



PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (PD) PROVINSI RIAU Tahun 2024

**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN PROVINSI RIAU**
Jl. Patiimura No. 2 Pekanbaru



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Riau Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2024, maka Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan Bappeda menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024;
- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024**

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL PELAKSANAAN EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 September 2024

Pj. GUBERNUR RIAU,

RAHMAN HADI

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 September 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

S. F. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR : 38

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan.....	3
1.4. Sistematisa Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD	7
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah.....	25
2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD ...	30
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH...	40
BAB IV PENUTUP	70

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Evaluasi Hasil Rencana Kerja Tahun 2024 s/d Triwulan II Dinas Pternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	8
2.2	Kinerja Pelayanan Dinas Pternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.....	24
2.3.1	Produksi Daging Berdasarkan Jenis Ternak.....	26
2.3.2	Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	28
2.4	Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Provinsi Riau Tahun 2024.....	31
3	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Riau	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2024 adalah salah satu upaya menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

Seiring dengan pelaksanaan program kegiatan pembangunan Provinsi Riau Tahun 2024 sebagaimana telah tertuang dalam APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 yang dalam proses penyusunannya mempedomani RKPD Provinsi Riau Tahun 2024, maka diperlukan perubahan dan rasionalisasi anggaran sehingga pada akhir tahun anggaran pelaksanaan pembangunan dapat berjalan optimal.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dijelaskan tentang Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun berdasarkan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah dan mengacu hal-hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024;
- b. Penambahan kegiatan baru sebagai akibat Kebijakan Nasional atau Provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundangan yang lebih tinggi;
- c. Upaya optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran;
- d. Memperhatikan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
- e. Penyesuaian kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai sampai Desember Tahun 2024 berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Perangkat Daerah dengan BPKAD.

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai implementasi dari visi dan misi Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka mendukung Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) adalah untuk :

- a. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2024 dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau
- b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional

- c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan
- d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan
- e. Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, sasaran dan kebijakan pengawasan internal.

1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan

Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Gubernur Riau No : 2350/SE/2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Perangkat Daerah termasuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW. II) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Penambahan atau pengurangan

target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 11);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 46)
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 31).
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 38).

1.4. Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Memuat Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Dasar Pertimbangan Perubahan serta Sistematika Penulisan.

Bab II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Memuat tentang evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II.

Bab III. Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

Memuat kegiatan/sub kegiatan, pergeseran kegiatan/sub kegiatan, penghapusan kegiatan/sub kegiatan, penambahan kegiatan/sub kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana Program dan kegiatan/sub kegiatan yang mencakup semua rencana program dan kegiatan/sub kegiatan dan pengeluaran pembiayaan.

Bab IV. Penutup

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan, catatan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui: 1) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; 2) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan 3) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana dimaksud selain untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program, implikasi yang timbul serta tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil, hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2024 sampai dengan Triwulan II, adalah sebagaimana Tabel 2.1 berikut:

**TABEL.2.1.EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2024**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET PERUBAHAN RENSTRA PADA TAHUN 2019 - 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN TAHUN 2024				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 SD.TW II		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
									K	Rp.	K	Rp.											
1	4	5	6			7			8			9		10		11=9+10		12=11/8x100		13=11+7		14=13/6x100	
											47.555.554.693	-	6.033.190.003	-	12.359.007.793	-	18.392.197.796				64.685.135.696		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi (Persen)	7,44	Persen	57.363.537.461	3,84	Persen	13.770.856.350	1,85	Persen	11.144.326.877	-	74.299.214	-	1.218.592.000	-	1.292.891.214	-	11,60	3,84	15.063.747.564	51,61	26,26
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah kelompok yang mengembangkan SDGH (Kelompok)	7	kelompok	847.420.000	4	kelompok	175.190.100	2	kelompok	350.000.000	0	-	-	149.400.000	-	149.400.000	-	42,69	4	324.590.100	57,14	38,30
	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	8	Laporan	847.420.000	7	Laporan	175.190.100	1	Laporan	350.000.000	0	-	0,5	149.400.000	0,50	149.400.000	50,00	42,69	8	324.590.100	93,75	38,30
	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah produksi pakan unggul (Ton)	3.920	Ton	2.133.489.715	1.834	Ton	862.819.489	1350	Ton	624.803.877	338	-	400	44.012.000	738	44.012.000	54,67	7,04	2.572	906.831.489	65,61	42,50
	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	15	Laporan	2.133.489.715	9	Laporan	862.819.489	1	Laporan	624.803.877	0	-	0	44.012.000	-	44.012.000	-	7,04	9	906.831.489	60,00	42,50
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Angka kelahiran (Persen)	13,20	Persen	5.340.691.466	10,37	Persen	712.275.150	13,2	Persen	1.995.385.000	1,55	355.000	1,25	140.766.500	3	141.121.500	21,21	7,07	13	57.265.500	99,77	1,07
	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	19	Laporan	642.520.000	9	Laporan	521.407.650	1	Laporan	161.555.000	0	355.000	0	469.000	-	824.000	-	0,51	9	522.231.650	47,37	81,28
	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	37	Laporan	4.575.411.466	25	Laporan	190.867.500	12	Laporan	1.711.070.000	3	-	3	83.032.000	6	83.032.000	50,00	4,85	31	273.899.500	83,78	5,99
	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar	300,00	Dokumen	122.760.000	0	Dokumen	-	300	Dokumen	122.760.000	0	-	1	57.265.500	1	57.265.500	0,33	46,65	1	57.265.500	0,33	46,65
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (Satuan Ternak)/ST	3.504	ST (Satuan Ternak)	49.041.936.280	989	ST (Satuan Ternak)	12.020.571.611	340	ST (Satuan Ternak)	8.174.138.000	0	73.944.214	60	884.413.500	60	958.357.714	17,65	11,72	1.049	12.978.929.325	29,94	26,46
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	3.504	Ekor	49.041.936.280	10693	Ekor	12.020.571.611	34000	ekor	8.174.138.000	0	73.944.214	60	884.413.500	60	958.357.714	0,18	11,72	10.753	12.978.929.325	306,88	26,46
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		16,75	18,91			98,69	40,20
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET PERUBAHAN RENSTRA PADA TAHUN 2019 - 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN TAHUN 2024				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 SD.TW II		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024				
									I		II												
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan (Persen)	64	Persen	1.701.863.500	30,75	Persen	-	27	Persen	1.701.863.500	0	63.613.300	-	1.297.500	-	64.910.800	-	3,81	31	64.910.800	48,05	3,81
	Penataan Prasarana Pertanian	Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana	64	Persen	1.701.863.500	36	Persen	-	27	Persen	1.701.863.500	0	63.613.300	-	1.297.500	-	64.910.800	-	3,81	36	64.910.800	56,64	3,81
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1	Unit	1.701.863.500	0	Unit	-	1	Unit	1.701.863.500	0	63.613.300	0	1.297.500	-	64.910.800	-	3,81	-	64.910.800	-	3,81
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															-	3,81				-	3,81		
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok yang membentuk korporasi (Persen)	9	Persen	8.863.058.230	7	Persen	4.374.710.623	9	Persen	2.287.298.689	0	-	-	706.722.375	-	706.722.375	-	30,90	7	5.081.432.998	77,78	57,33
	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok yang dinaikkan status kelas kelompoknya	202	kelompok	8.213.058.230	85	kelompok	4.374.710.623	77	kelompok	2.004.757.435	0	-	-	628.507.375	-	628.507.375	-	31,35	85	5.003.217.998	42,08	60,92
	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (kelompok)	661	kelompok	8.213.058.230	661	kelompok	4.374.710.623	661	kelompok	2.004.757.435	661	-	661	628.507.375	661	628.507.375	100,00	31,35	661	5.003.217.998	100,00	60,92
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok ternak yang menerapkan sistem agribisnis (Kelompok)	60	kelompok	650.000.000	26	kelompok	-	60	kelompok	282.541.254	0	-	-	78.215.000	-	78.215.000	-	27,68	26	78.215.000	43,33	12,03
	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani (Laporan)	24	Laporan	650.000.000	12	Laporan	-	2	Laporan	282.541.254	0	-	0	78.215.000	-	78.215.000	-	27,68	12	78.215.000	50,00	12,03
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															50,00	29,52				75,00	36,48		
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sedang	Sangat Rendah		
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Persentase Angka Kematian ternak (Persen)	2,2	Persen	4.640.381.765	2,20	Persen	166.975.369	2,50	Persen	5.125.362.924		105.945.310		678.902.412	-	784.847.722	-	15,31	2,20	951.823.091	59,09	20,51
		2. Persentase Peningkatan Unit Usaha penyedia produk hewan yang menerapkan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan produk	40	Persen		47	Persen		10,0	Persen													
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase penurunan kasus PHMS (Persen)	40	Persen	3.959.733.970	22,39	Persen	-	10	Persen	3.959.733.970	0	49.045.310	-	315.968.100	-	365.013.410	-	9,22	22	365.013.410	55,98	9,22
	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	24	Wilayah	209.519.900	0	Wilayah	-	24	Wilayah	209.519.900	0	5.000.000	0	19.028.300	-	24.028.300	-	-	-	24.028.300	-	11,47
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	36	Laporan	3.750.214.070	0	Laporan	-	36	Laporan	3.750.214.070	9	44.045.310	9	296.939.800	18	340.985.110	50,00	-	18	340.985.110	50,00	9,09
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point (Persen)	90	Persen	217.817.591	82,25	Persen	166.975.369	90	Persen	702.798.750	0	49.200.000	-	254.801.500	-	304.001.500	-	43,26	82	470.976.869	91,39	216,23
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	62	Laporan	217.817.591	62	Laporan	166.975.369	60	Laporan	702.798.750	15	49.200.000	15	254.801.500	30	304.001.500	50,00		92	470.976.869	148,39	216,23
	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah wilayah yang memenuhi persyaratan Keamanan, Kesehatan, Ketuhan dan Halal pada penyediaan produk pangan asal hewan segar	29	Wilayah	462.830.204	0,00	Wilayah	-	29	Wilayah	462.830.204	0	7.700.000	-	108.132.812	-	115.832.812	-	25,03	-	115.832.812	-	25,03
	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	56	Laporan	328.710.340	0	Laporan	-	56	Laporan	328.710.340	0	7.700.000	56	99.685.948	56	107.385.948	100,00	32,67	56	107.385.948	100,00	32,67
	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	30	Orang	134.119.864	0	Orang	-	30	Orang	134.119.864	0	-	30	8.446.864	30	8.446.864	100,00	6,30	30	8.446.864	100,00	6,30
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															300,00	38,97				398,39	275,75		
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET PERUBAHAN RENSTRA PADA TAHUN 2019 - 2024			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2024			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN TAHUN 2024				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 SD.TW II		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		
			K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.											
															K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (persen)	100	Persen	85.589.286.621	100	Persen	27.980.395.558	100	Persen	27.296.702.703	0	5.789.332.179	-	9.753.493.506	-	15.542.825.685	-	56,94	100	43.523.221.243	100,00	50,85	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	48	Dokumen	225.000.000	0	Dokumen	-	12	Dokumen	131.543.400	0	-	3	104.012.000	3	104.012.000	60,00	79,07		104.012.000	-	46,23	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	Dokumen	225.000.000	0	Dokumen	-	5	Dokumen	131.543.400	1	-	2	104.012.000	3	104.012.000	60,00	79,07	3	104.012.000	37,50	46,23	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi (Laporan)	5	Laporan	60.198.617.271	5	Laporan	17.404.697.956	5	Laporan	20.954.871.988	0	4.599.829.151	-	7.859.601.725	-	12.459.430.876	-	59,46	5	29.864.128.832	100,00	49,61	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang Bulan)	5.508	Orang Bulan	60.198.617.271	2766	Orang Bulan	17.404.697.956	1.404	Orang Bulan	20.954.871.988	357	4.599.829.151	357	7.859.601.725	714	12.459.430.876	50,85	59,46	3.480	29.864.128.832	63,18	49,61	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola (Laporan)	7	Laporan	225.000.000	7	Laporan	-	7	Laporan	241.193.805	0	-	-	222.568.501	-	222.568.501	-	92,28	7	222.568.501	100,00	98,92	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	Dokumen	225.000.000	1	Dokumen	-	1	Dokumen	241.193.805	0	-	0	222.568.501	-	222.568.501	-	92,28	1	222.568.501	50,00	98,92	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi (Jenis Layanan)	5	Jenis Layanan	5.085.955.574	5	Jenis Layanan	2.888.091.715	5	Jenis Layanan	1.390.140.677	5	285.935.873	5	512.695.885	5	798.631.758	100,00	57,45	10	3.686.723.473	200,00	72,49	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	Paket	152.716.432	2	Paket	91.322.108	1	Paket	54.999.227	0,25	28.885.842	0,25	-	0,50	28.885.842	50,00	52,52	3	120.207.950	62,50	78,71	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	Paket	711.739.246	2	Paket	763.387.740	2	Paket	413.456.754	1	8.700.000	0,5	241.732.500	1,50	250.432.500	75,00	60,57	4	1.013.820.240	87,50	142,44	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8	Paket	1.545.530.210	4	Paket	377.169.994	1	Paket	201.331.160	0,25	18.917.616	0,25	43.234.893	0,50	62.152.509	50,00	30,87	5	439.322.503	56,25	28,43	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	Paket	548.102.716	2	Paket	203.809.848	1	Paket	157.408.536	0	-	0,5	73.731.500	0,50	73.731.500	50,00	46,84	3	277.541.348	62,50	50,64	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	48	Laporan	2.127.866.970	24	Laporan	1.452.402.025	12	Laporan	562.945.000	3	229.432.415	3	153.996.992	6	383.429.407	50,00	68,11	30	1.835.831.432	62,50	86,28	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)	14	Jenis	17.464.633.776	7	Jenis	6.430.093.156	4	Jenis	3.892.922.833	4	682.278.955	4	766.115.895	4	1.448.394.850	100,00	37,21	11	7.878.488.006	78,57	45,11	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	Laporan	92.160.000	3	Laporan	31.778.500	1	Laporan	5.280.000	0,25	633.000	0,25	457.000	1	1.090.000	50,00	20,64	4	32.868.500	87,50	35,66	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	Laporan	3.904.717.191	24	Laporan	1.315.822.648	12	Laporan	1.099.699.468	3	189.883.285	3	213.275.531	6	403.158.816	50,00	36,66	30	1.718.981.464	62,50	44,02	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	8	Laporan	3.904.717.191	4	Laporan	597.337.008	1	Laporan	95.400.000	0,5	47.700.000	0	-	1	47.700.000	50,00	50,00	5	645.037.008	56,25	16,52	
	Penyediaan Jasi Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	48	Laporan	9.563.039.394	24	Laporan	4.485.155.000	12	Laporan	2.692.543.365	3	444.062.670	3	552.383.364	6	996.446.034	50,00	37,01	30	5.481.601.034	62,50	57,32	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis)	19	Jenis	2.615.080.000	9	Jenis	1.257.512.731	3	Jenis	686.030.000	3	221.288.200	3	288.499.500	3	509.787.700	100,00	74,31	12	1.767.300.431	63,16	67,58	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	45	Unit	1.536.350.000	26	Unit	863.253.520	1	Unit	44.030.000	1	15.571.600	1	20.226.600	1	35.798.200	100,00	81,30	27	899.051.720	60,00	58,52	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	123	Unit	733.200.000	104	Unit	95.660.800	16	Unit	614.950.000	12	196.010.600	4	264.972.900	16	460.983.500	100,00	74,96	120	556.644.300	97,56	75,92	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	22	Unit	345.530.000	18	Unit	298.598.411	18	Unit	27.050.000	5	9.706.000	4	3.300.000	9	13.006.000	50,00	48,08	27	311.604.411	122,73	90,18	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		55,72	55,89				68,73	63,96
Predikat Kinerja																		Rendah	Rendah				Sedang	Rendah

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET PERUBAHAN RENSTRA PADA TAHUN 2019 - 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN TAHUN 2024				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 SD.TW II		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024 (%)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024				
									I		II												
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	UPT. IBT		365	IBT	8.239.977.970	0		3.058.793.314	129		5.525.600.108		145.619.980		816.141.061		961.761.041						
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi (Persen)	7,44	Persen	4.561.359.316	3,84	Persen	1.257.368.035	1,85	Persen	2.462.576.100		98.969.420		735.481.221	-	834.450.641	-	33,89	3,84	2.091.818.676	51,61	45,86
	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Semen Beku Yang Memenuhi SNI (dosis)	171.000	Dosis	3.835.614.316	100099	Dosis	1.257.368.035	55.000	Dosis	2.078.156.100	17.063	98.969.420	8316	735.481.221	25.979	834.450.641	47,23	40,15	126.078	2.091.818.676	73,73	54,54
	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (laporan)	37	Orang	3.835.614.316	24	Orang	1.257.368.035	12	Laporan	2.078.156.100	3	98.969.420	3	735.481.221	6	834.450.641	50,00	40,15	30	2.091.818.676	81,08	54,54
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Sapi Bull yang diadakan (Ekor)	16	Ekor	725.745.000	6	Ekor	-	6	Ekor	384.420.000	0	-	-	-	-	-	-	-	6	-	37,50	-
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ekor)	16	Ekor	725.745.000	6	Ekor	-	6	Ekor	384.420.000	0	-	0	-	-	-	-	-	6	-	37,50	-
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																25,00	20,08			59,29	27,27		
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan (Persen)	64	Persen	2.543.411.600	30,75	Persen	1.394.439.522	27	Persen	2.762.126.648		-	-	-	-	-	-	31	1.394.439.522	48,05	54,83	
	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)	74	Persen	2.543.411.600	74	Persen	1.394.439.522	74	Persen	2.762.126.648		-	-	-	-	-	-	62	1.394.439.522	83,78	54,83	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dihangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	12	Unit	2.543.411.600	8	Unit	1.394.439.522	6	unit	2.762.126.648	0	-	0	-	-	-	-	8	1.394.439.522	66,67	54,83	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																-	-			66,67	54,83		
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Rendah		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (persen)	100	Persen	1.135.207.054	100	Persen	406.985.758	100	Persen	300.897.360	0	46.650.560	-	80.659.840	-	127.310.400	-	42,31	100	534.296.158	100,00	47,07
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi (Jenis Layanan)	3	Jenis Layanan	161.256.974	2	Jenis Layanan	59.962.398	1	Jenis Layanan	20.994.000	1	-	1	10.684.000	1	10.684.000	50,00	50,89	3	70.646.398	100,00	43,81
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7	Paket	73.839.469	2	Paket	24.980.000	1	Paket	20.994.000	0	-	0,25	10.684.000	0,25	10.684.000	25,00	50,89	2	35.664.000	32,14	48,30
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	Paket	65.430.139	2	Paket	24.996.155	-	Paket	-	0	-	0	-	-	-	-	-	2	24.996.155	66,67	38,20
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)	1	Jenis	839.710.080	1	Jenis	279.903.360	1	Jenis	279.903.360	1	46.650.560	1	69.975.840	1	116.626.400	50,00	41,67	1	396.529.760	100,00	47,22
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	36	Laporan	839.710.080	24	Laporan	279.903.360	12	Laporan	279.903.360	3	46.650.560	3	69.975.840	6	116.626.400	50,00	41,67	30	396.529.760	83,33	47,22
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																25,00	30,85			60,71	44,57		
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET PERUBAHAN RENSTRA PADA TAHUN 2019 - 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN TAHUN 2024				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 SD.TW II		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024 (%)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024						
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									K	Rp.			
	UPT.LVKH				14.839.798.289			4.758.626.685			6.125.710.047			188.282.576			1.740.452.631			1.928.735.207			6.901.898.238		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan (Persen)	64	Persen	5.163.513.172	30,75	Persen	894.212.315	27	Persen	780.802.000	0	-	-	-	12.041.280	-	-	1,54	31	906.253.595	48,05	17,55		
	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase kelompok yang memanfaatkan prasarana	64	Persen	5.163.513.172	36	Persen	894.212.315	76	Persen	780.802.000	0	-	-	-	12.041.280	-	-	1,54	36	906.253.595	56,64	17,55		
	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara (Unit)	4	Dokumen	4.263.513.172	2	Dokumen	894.212.315	3	Dokumen	190.000.000	0	-	0	-	-	-	-	2	894.212.315	50,00	20,97			
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	3	Unit	900.000.000	1	Unit	-	4	Unit	590.802.000	0	-	0	-	12.041.280	-	-	2,04	1	12.041.280	33,33	1,34		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																-	1,02				41,67	11,16			
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Angka Kematian ternak (Persen)	2,2	Persen	10.756.186.175	2,20	Persen	3.432.319.720	2,20	Persen	3.414.413.529		116.349.720		1.480.587.071	-	1.596.936.791	-	46,77	3,10	5.029.256.511	59,09	46,76		
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase penurunan kasus PHMS (Persen)	40	Persen	6.256.623.183	22,39	Persen	1.513.958.702	10	Persen	2.012.211.756		62.133.720		907.431.381	-	969.565.101	-	48,18	22	2.483.523.803	55,98	39,69		
	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Laporan)	37	Laporan	4.244.411.427	24	Laporan	1.513.958.702	12	Laporan	-	0	-	0	-	-	-	-	24	1.513.958.702	64,86	35,67			
	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	12	Laporan	2.012.211.756	0	Laporan	-	12	Laporan	2.012.211.756	3	62.133.720	3	907.431.381	6	969.565.101	50,00	48,18	6	969.565.101	50,00	48,18		
	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha yang menerapkan persyaratan teknis Keswan kesmavet	70	Unit	4.499.562.992	62	Unit	1.918.361.018	25	Unit	1.402.201.773	5	54.216.000	7	573.155.690	12	627.371.690	48,00	44,74	74	2.545.732.708	105,71	56,58		
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	1.000	Dokumen	4.499.562.992	622	Dokumen	1.918.361.018	270	Dokumen	1.402.201.773	94	54.216.000	71	573.155.690	165	627.371.690	61,11	44,74	787	2.545.732.708	78,70	56,58		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																37,04	30,98				64,52	46,81			
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah				Rendah	Sangat Rendah			

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET PERUBAHAN RENSTRA PADA TAHUN 2019 - 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN TAHUN 2024				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 SD.TW II		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024 (%)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024				
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
									K	Rp.	K	Rp.											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (persen)	100	Persen	2.725.612.114	100	Persen	646.630.996	100	Persen	1.930.494.518	0	71.932.856	-	247.824.280	-	319.757.136	-	16,56	100	966.388.132	100,00	35,46
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi (Jenis Layanan)	6	Jenis Layanan	480.556.984	4	Jenis Layanan	351.498.404	3	Jenis Layanan	430.737.000	1	14.987.000	2	164.175.000	3	179.162.000	100,00	41,59	7	530.660.404	116,67	110,43
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	Paket	363.140.984	2	Paket	308.689.404	1	Paket	387.500.000	0	-	0,5	160.500.000	1	160.500.000	50,00	41,42	3	469.189.404	83,33	129,20
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	Paket	87.416.000	3	Paket	42.809.000	1	Paket	28.250.000	0	-	0,25	3.675.000	0,25	3.675.000	25,00	13,01	3	46.484.000	81,25	53,18
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	Paket	30.000.000	2	Paket	-	1	Paket	14.987.000	1	14.987.000	0	-	1	14.987.000	100,00	100,00	3	14.987.000	150,00	49,96
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (Jenis Barang)	10	Jenis Barang	1.178.500.000	4	Jenis Barang	-	3	Jenis Barang	918.500.000	0	-	-	-	-	-	-	-	4	-	40,00	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2	Paket	75.000.000	2	Paket	-	0	Paket	-	0	-	0	-	-	-	-	-	2	-	100,00	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Unit	653.500.000	0	Unit	-	20	Unit	653.500.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	80.000.000	0	Unit	-	1	Unit	80.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	Unit	370.000.000	7	Unit	-	103	Unit	185.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	7	-	350,00	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)	9	Jenis	912.765.132	4	Jenis	239.017.592	2	Jenis	461.007.520	1	56.945.856	1	83.649.280	1	140.595.136	25,00	30,50	5	379.612.728	50,00	41,59
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	Laporan	112.969.086	1	Laporan	37.617.500	1	Laporan	50.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	1	37.617.500	33,33	33,30
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	48	Laporan	799.796.046	24	Laporan	201.400.092	12	Laporan	411.007.520	3	56.945.856	3	83.649.280	6	140.595.136	50,00	34,21	30	341.995.228	62,50	42,76
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis)	84	Jenis	153.789.998	23	Jenis	56.115.000	3	Jenis	120.249.998	0	-	-	-	-	-	-	-	23	56.115.000	27,38	36,49
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	24	Unit	47.540.000	34	Unit	18.705.000	17	Unit	14.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	34	18.705.000	141,67	39,35
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	31.249.998	34	Unit	18.705.000	3	Unit	31.249.998	0	-	0	-	-	-	-	-	34	18.705.000	1.133,33	59,86
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22	Unit	75.000.000	34	Unit	18.705.000	22	Unit	75.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	34	18.705.000	154,55	24,94
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															18,75	14,66				176,30	36,04		
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Tinggi	Sangat Rendah		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET PERUBAHAN RENSTRA PADA TAHUN 2019 - 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN TAHUN 2024				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 SD.TW II		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024 (%)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024				
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
									K	Rp.	K	Rp.											
	UPT,PTP			9.613.577.723		4.239.368.453		3.370.599.560		219.593.064		1.913.801.496		2.133.394.560									
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi (Persen)	7,44	Persen	5.197.636.998	4	Persen	2.049.032.854	1,85	Persen	1.435.402.560		106.075.120		552.395.218	-	658.470.338	-	45,87	4	2.707.503.192	51,61	52,09
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bibit ternak yang ber SKLB di UPT (ekor)	50	Ekor	5.197.636.998	0	Ekor	2.049.032.854	20	Ekor	1.435.402.560	0	106.075.120	-	552.395.218	-	658.470.338	-	45,87	-	2.707.503.192	-	52,09
	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi (laporan)	86	Laporan	5.197.636.998	48	Laporan	2.049.032.854	12	Laporan	1.435.402.560	3	106.075.120	3	552.395.218	6	658.470.338	50,00	45,87	54	2.707.503.192	62,79	52,09
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																50,00	45,87				62,79	52,09	
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah				Rendah	Rendah	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan (Persen)	64	Persen	1.493.695.000	31	Persen	811.753.203	27	Persen	1.064.692.000	-	-	1.056.084.002	-	1.056.084.002	-	99,19	31	1.867.837.205	48,05	125,05	
	Penataan Prasarana Pertanian	Presentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)	63	Persen	1.493.695.000	60	Persen	811.753.203	63	Persen	1.064.692.000	0	-	1.056.084.002	-	1.056.084.002	-	99,19	60	1.867.837.205	95,24	125,05	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	7	unit	1.493.695.000	6	unit	811.753.203	4	unit	1.064.692.000	2	-	2	1.056.084.002	4	1.056.084.002	100,00	99,19	10	1.867.837.205	142,86	125,05
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																100,00	99,19				142,86	125,05	
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (persen)	100	Persen	2.922.245.725	100	Persen	1.378.582.396	100	Persen	870.505.000	-	113.517.944	-	305.322.276	-	418.840.220	-	48,11	100	1.797.422.616	100,00	61,51
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi (Jenis Layanan)	6	Jenis Layanan	129.671.423	5	Jenis Layanan	40.894.900	3	Jenis Layanan	258.440.000	1	36.150.000	3	137.133.480	1	173.283.480	33,33	67,05	6	214.178.380	100,00	165,17
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	Paket	53.311.423	2	Paket	23.238.900	1	Paket	100.000.000	0	-	1	98.643.480	1	98.643.480	100,00	98,64	3	121.882.380	100,00	228,62
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	Paket	58.360.000	3	Paket	15.656.000	1	Paket	21.320.000	0	-	0,25	4.840.000	0,25	4.840.000	25,00	22,70	3	20.496.000	81,25	35,12
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	Paket	10.000.000	2	Paket	-	1	Paket	137.120.000	0,25	36.150.000	0,25	33.650.000	1	69.800.000	50,00	50,90	3	69.800.000	125,00	698,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (Jenis Barang)	6	Jenis Barang	200.000.000	1	Jenis Barang	-	1	Jenis Barang	30.400.000	0	-	1	17.482.500	1	17.482.500	100,00	57,51	2	17.482.500	33,33	8,74
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	Unit	200.000.000	25	Unit	-	5	Unit	30.400.000	0	-	3	17.482.500	3	17.482.500	60,00	57,51	28	17.482.500	933,33	8,74
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)	3	Jenis	2.186.595.440	4	Jenis	767.774.496	3	Jenis	531.665.000	2	77.367.944	3	118.106.296	3	195.474.240	100,00	36,77	7	963.248.736	233,33	44,05
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	Laporan	356.400.000	12	Laporan	-	12	Laporan	48.000.000	3	11.655.000	3	11.655.000	6	23.310.000	50,00	48,56	18	23.310.000	75,00	6,54
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	Laporan	59.400.000	1	Laporan	-	1	Laporan	28.810.000	0	-	0,25	5.670.000	0,25	5.670.000	25,00	19,68	1	5.670.000	62,50	9,55
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	48	Laporan	1.770.795.440	24	Laporan	767.774.496	12	Laporan	454.855.000	3	65.712.944	3	100.781.296	6	166.494.240	50,00	36,60	30	934.268.736	62,50	52,76
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis)	38	Jenis	605.978.862	5	Jenis	569.913.000	1	Jenis	50.000.000	0	-	1	32.600.000	1	32.600.000	100,00	65,20	6	602.513.000	15,79	99,43
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	Unit	100.000.000	2	Unit	-	12	Unit	50.000.000	0	-	8	32.600.000	8	32.600.000	66,67	65,20	10	32.600.000	50,00	32,60
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																53,33	49,98	12,00		153.188.702,00	186,20	133,99	
Predikat Kinerja																Rendah	Sangat Rendah				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

Pada Tabel 2.1. Evaluasi hasil pelaksanaan renja pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II terlihat bahwa terdapat program, kegiatan dan sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, namun sebagian besar program, kegiatan serta sub kegiatan yang belum mencapai target dengan uraian sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target 50% kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Realisasi yang tidak memenuhi target kinerja 50% adalah :

- Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan capaian kinerja 0%. Indikator sub kegiatan adalah jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan target 1 dokumen. Target belum tercapai karena penyusunan dokumen pada triwulan IV.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Sub Kegiatan yang Realisasi yang tidak memenuhi target kinerja 50% adalah :

- Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan dengan tingkat capaian kinerja 0%.
- Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak dengan tingkat capaian kinerja 0%.
- Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang beredar. Indikator Sub Kegiatan jumlah benih/bibit ternak dan HPT bahan Pakan yang Beredar dengan target 300 dokumen, realisasi 1dokumen dengan tingkat capaian 0,33%.
- Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain dengan tingkat capaian kinerja 0,18%.

c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Sub Kegiatan yang Realisasi yang tidak memenuhi target kinerja 50% adalah :

- Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan dengan capaian 0%.

Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan dengan indikator jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan merupakan Sub Kegiatan pengganti/penyesuaian dari Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian dengan indikator Jumlah pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian. Penggantian sub kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Pemutakhiran Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 menjadi Kepmendagri Nomor 900.1.15.5.-1317 tahun 2023 yang mana Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian sudah tidak ada lagi. Pada Renja Tahun 2024 nama dan indikator sub kegiatan telah disesuaikan namun target belum disesuaikan dengan satuan indikatornya. Seharusnya target sub kegiatan yang baru dengan satuan unit targetnya sebanyak 22 unit, tapi di Renja 2024 masih tertulis targetnya 1 unit mengikuti target sub kegiatan sebelumnya sebanyak 1 dokumen.

Capaian Kinerja pada sub kegiatan ini masih 0%, saat ini masih proses persiapan pengadaan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di UPT Lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang kinerja sub kegiatannya tidak mencapai target kinerja hingga 50% adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- 1) UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan (UPT. LVKH)
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan tingkat capaian kinerja 25%.
 - Sub Kegiatan Pengadaan Gedung kantor dan Bangunan Lainnya dengan capaian 0%
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan tingkat capaian kinerja 0%.
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan tingkat capaian kinerja 0%
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan tingkat capaian 0%

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan tingkat capaian 0%
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya dengan tingkat capaian 0%.
- 2) UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan (UPT.PTP)
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan tingkat capaian kinerja 25%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan tingkat capaian 25%.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

1) UPT. Inseminasi Buatan Ternak

- Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain dengan tingkat capaian 0%.

c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

1) UPT. Inseminasi Buatan Ternak

- Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya dengan tingkat capaian 0%

2) UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan (UPT. LVKH)

- Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian dengan tingkat capaian 0%
- Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya dengan tingkat capaian 0%.

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang memenuhi/melebihi 50% target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Sub Kegiatan yang sudah memenuhi/melebihi target kinerja 50% adalah :

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja 60%

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan tingkat capaian kinerja 50,85%
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan tingkat capaian 50%
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan tingkat capaian 75%
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan tingkat capaian 50%
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan tingkat capaian 50%
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan tingkat capaian 50%
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan tingkat capaian 50%
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan tingkat capaian 50%
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralatan Kantor (50%)
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan dengan tingkat capaian 100%
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan tingkat 100%
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (50%).

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan dengan tingkat capaian kinerja 50%
- Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dengan tingkat capaian kinerja 50%

c. Program Penyuluhan Pertanian

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani dengan tingkat capaian kinerja 100%

d. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Sub Kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja 50% adalah

- Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam satu Daerah provinsi dengan tingkat capaian 50%
- Sub Kegiatan Pengawasan dan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan produk Hewan dengan tingkat capaian 50%
- Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan dengan tingkat capaian
- Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dengan tingkat capaian 100%.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di UPT Lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang kinerja sub kegiatannya mencapai/melebihi target kinerja 50% adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1) UPT. Inseminasi Buatan Ternak

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan tingkat capaian kinerja 50%

2) UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan (UPT. LVKH)

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan tingkat capaian kinerja 50%
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material dengan tingkat capaian kinerja 100%
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan tingkat capaian kinerja 50%

3) UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan (UPT.PTP)

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan tingkat capaian kinerja 100%
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material dengan tingkat capaian kinerja 50%

- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan tingkat capaian kinerja 60%
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan tingkat capaian 50%
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan tingkat capaian kinerja 50%
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan tingkat capaian 66,67%

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

1) UPT. Inseminasi Buatan Ternak

- Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi dengan tingkat capaian 50%.

2) UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan (UPT.PTP)

- Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan dan produksi Benih/Bibit Ternak dan hijauan Pakan Ternak dengan tingkat capaian 50%.

c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

1) UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan (UPT.PTP)

- Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta sarana Pendukungnya dengan tingkat capaian 100%.

d. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Sub Kegiatan yang capaian kinerjanya mencapai 50% atau lebih adalah :

1) UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan (UPT. LVKH)

- Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan klinik Hewan dengan tingkat capaian kinerja 50%
- Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan tingkat capaian kinerja 61,11%.

2.1.3. Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Program/Kegiatan

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya kinerja beberapa sub kegiatan sampai dengan Triwulan II pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan capaian kinerja 0%. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja pada Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, adalah karena indikator kinerjanya adalah jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah yang targetnya 1 Dokumen disusun pada Triwulan IV, namun walaupun penyusunan dokumen dilaksanakan pada Triwulan IV, sebagian rincian kegiatannya telah dilaksanakan.
- Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi dengan tingkat capaian kinerja 0%. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja pada Sub Kegiatan adalah karena indikator kinerjanya adalah jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang targetnya 1 Laporan disusun pada Triwulan IV, namun walaupun penyusunan dokumen dilaksanakan pada Triwulan IV, sebagian rincian kegiatannya telah dilaksanakan.
- Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak dengan tingkat capaian kinerja 0%. Capaian kinerja diukur dengan indikator Jumlah Laporan Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat dengan target 1 laporan. Laporan disusun pada akhir Triwulan IV karena berisi akumulasi pengawasan dari bulan Januari sampai Desember.
- Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang beredar. Indikator Sub Kegiatan jumlah benih/bibit ternak dan HPT bahan Pakan yang Beredar dengan target 300 dokumen dengan capaian 0,33%. Dengan ditetapkannya Pemutakhiran Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 menjadi Kepmendagri Nomor

900.1.15.5.-1317 tahun 2023 yang di dalamnya terdapat perubahan satuan indikator untuk Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang beredar dari yang semula satuannya Ton menjadi Dokumen. Pada penyusunan Renja Tahun 2024 satuannya sudah disesuaikan namun target tidak disesuaikan sehingga yang seharusnya targetnya 1 Dokumen menjadi 300 dokumen, hal inilah yang menyebabkan capaian kinerja menjadi rendah atau tidak tercapai.

- Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain dengan tingkat capaian kinerja 0,18%. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain dengan target 34.000 ekor ayam. Pada tahapan KUA PPAS jumlah ternak bertambah menjadi Sapi 60 ekor, kambing 100 ekor, itik 8.000 ekor, kerbau 5 ekor dan ayam 34.000. Sampai dengan triwulan II pengadaan ternak yang telah terealisasi adalah pengadaan sapi sebanyak 60 ekor, sedangkan ternak lainnya masih tahap proses kontrak.
- Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan dengan capaian 0%.

Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan dengan indikator jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan merupakan Sub Kegiatan pengganti/penyesuaian dari Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian dengan indikator Jumlah pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian. Penggantian sub kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Pemutakhiran Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 menjadi Kepmendagri Nomor 900.1.15.5.-1317 tahun 2023 yang mana Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian sudah tidak ada lagi. Pada Renja Tahun 2024 nama dan indikator sub kegiatan telah disesuaikan namun target belum disesuaikan dengan satuan indikatornya. Seharusnya target sub kegiatan yang baru dengan satuan unit targetnya sebanyak 22 unit, tapi di Renja 2024 masih tertulis targetnya 1 unit mengikuti target sub

kegiatan sebelumnya sebanyak 1 dokumen. Capaian Kinerja pada sub kegiatan ini masih 0%, saat ini masih proses persiapan pengadaan.

- Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain dengan tingkat capaian 0% (UPT.IBT). Pengadaan ternak belum dapat dilaksanakan karena pagu dana untuk pengadaan Sapi Bull tidak sesuai dengan harga pasara sehingga perlu disesuaikan dahulu pada Perubahan APBD tahun 2024.
- Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya dengan tingkat capaian 0% (UPT.IBT). Kegiatan pembangunan belum dilaksanakan karena gedung yang akan dibangun belum ada RKBMD nya.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2024 tidak mengalami kendala, kinerja sub kegiatan yang belum tercapai sampai Triwulan II dikarenakan sebagian besar kinerja baru bisa diukur setelah semua selesai dilaksanakan atau setelah akhir kegiatan.

2.1.4. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Dengan tercapainya target kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan, maka Capaian Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berpeluang besar dapat tercapai sesuai dengan target Renstra. Namun dengan ditetapkannya Pemutakhiran Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 menjadi Kepmendagri Nomor 900.1.15.5.-1317 tahun 2023, menyebabkan terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan berubah nama dan indikatornya yang tentunya hal tersebut dapat mempengaruhi capaian kinerja.

2.1.5. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Dalam upaya mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan, maka perlu diperhatikan dan diantisipasi melalui analisis resiko terhadap semua kegiatan dan perlu adanya pengendalian interen dalam pelaksanaan kegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil analisis capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator yang telah ditentukan di dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024 **(Tabel T-C.30)**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasion al	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi				Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024 sd TW II	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Peternakan	-	-	101.75	102.35	103.50	104.20	99,76 (86,74%)	99.5 (97,21%)	99,32 (95,96%)	95,14 (91,31%)	Realisasi tahun 2024 merupakan capaian sampai dengan Triwulan II
2	Produksi Daging (Ton)	-	-	59.912	61.096	62.303	63.303	65.408 (109,17%)	77.730 (127,22%)	77.838 (124,93%)	40.137 (63,40%)	Realisasi tahun 2024 merupakan capaian sampai dengan Triwulan II
3	Persentase Status Kesehatan Hewan (%)	-	-	95,9	96,6	97,3	98	94,1 (98%)	94.9 (98,24%)	96,47 (99,15%)	96,47	Realisasi tahun 2024 merupakan angka capaian tahun 2023, persentase status kesehatan hewan hanya bisa dihitung setelah TW IV
4	Persentase produk hewan yang ASUH (%)	-	-	-	5	5	5	-	4.32 (86,4%)	4,48 (89,6%)	4,48	Realisasi tahun 2024 merupakan angka capaian tahun 2023, Persentase produk hewan yang ASUH hanya bisa dihitung setelah TW IV

Dari Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau berdasarkan indikator yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa indikator Produksi Daging telah mencapai target bahkan melebihi target dan tiga indikator yang lain belum mencapai target. Indikator yang belum mencapai target yaitu pada Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Peternakan, Persentase Status Kesehatan Hewan dan Persentase Peningkatan Produk Hewan yang ASUH (%).

Tercapainya target produksi daging dengan persentase realisasi sebesar 124,93% pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dan Program Penyuluhan Pertanian berjalan dengan baik dan lancar dan memberikan outcome yang baik terhadap peningkatan produksi daging. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi daging selama

beberapa tahun terakhir. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi daging diantaranya adalah dengan peningkatan populasi ternak. Peningkatan populasi ternak dilakukan melalui optimalisasi reproduksi (Inseminasi Buatan, Kawin alam dan transfer Embrio) dan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat. Peningkatan populasi juga didukung oleh ketersediaan Pakan Ternak baik itu Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang berkualitas maupun juga Pakan Olahan.

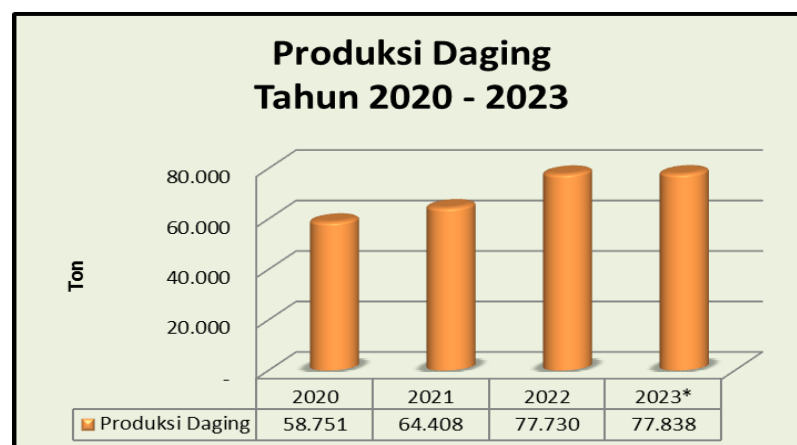
Sampai dengan triwulan II tahun 2024 tingkat capaian NTUP sebesar 91,31%, produksi daging 63,4%, sedangkan untuk indikator Persentase Status Kesehatan Hewan dan Persentase produk hewan yang ASUH belum dapat dihitung, penghitungan dilakukan setelah akhir triwulan IV. Jadi angka sementara menggunakan capaian tahun 2023.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan PD dan Hal Kritis Terkait Pelayanan PD

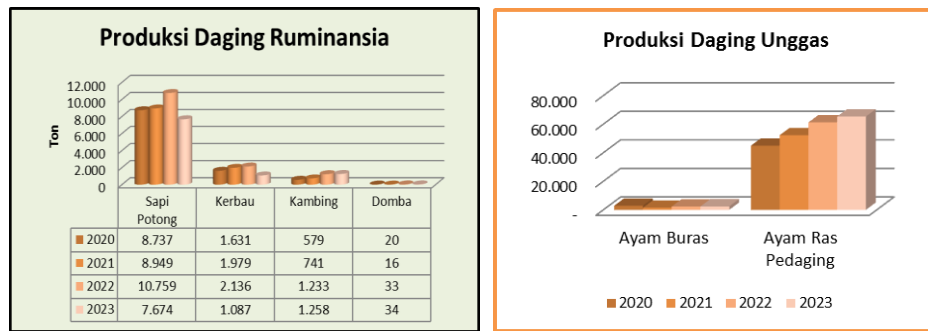
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dapat menjadi salah satu tumpuan dalam percepatan pembangunan wilayah di Provinsi Riau. Pembangunan sub sektor peternakan diusahakan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dengan tujuan disamping untuk memperbaiki serta meningkatkan gizi masyarakat, juga merupakan sumber pendapatan masyarakat.

Capaian target produksi daging pada tahun 2023 sebesar 77.838.578 kg atau 77.838 ton (103,08%). Capaian kinerja ini sudah sangat bagus karena sudah melebihi target yang ditetapkan di Renstra.



Gambar 2.3.1. Produksi daging tahun 2020 - 2023

Adapun produksi daging ruminansia secara keseluruhan untuk ternak sapi, kerbau dan kambing dan domba dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.3.2. Grafik Produksi daging ruminansia dan unggas

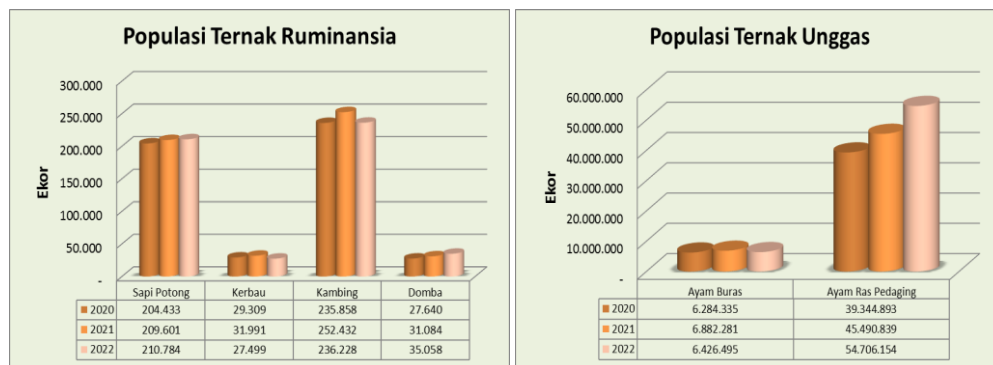
Tabel.2.3.1. Produksi Daging Berdasarkan Jenis Ternak (Kg)

Jenis Ternak	2020	2021	2022	2023*
Sapi Potong	8.737.301	8.948.696	10.759.381	7.674.464
Kerbau	1.631.055	1.978.715	2.135.773	1.087.471
Kambing	578.579	741.404	1.232.929	1.257.600
Domba	19.879	15.583	33.332	34.000
Ayam Buras	2.869.213	1.481.144	2.353.334	2.400.000
Ayam Ras Pedaging	44.915.106	52.242.136	61.214.925	65.385.043
Jumlah	58.751.133	65.407.678	77.729.674	77.838.578

Dari Tabel 2.3.1. dapat dilihat bahwa produksi daging Tahun 2023 di Riau sebanyak 77.838.578 Kg atau 77.839 Ton. Produksi daging tersebut berasal dari ternak ruminansia dan unggas baik ternak lokal maupun produksi daging dari pemotongan tenak yang didatangkan dari luar Provinsi Riau.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi daging selama beberapa tahun terakhir. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi daging diantaranya adalah dengan peningkatan populasi ternak. Peningkatan populasi ternak dilakukan melalui optimalisasi reproduksi (Inseminasi Buatan, Kawin alam dan transfer Embrio) dan pendistribusian ternak kepada masyarakat. Peningkatan populasi juga didukung oleh ketersediaan Pakan Ternak baik itu Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang berkualitas maupun juga Pakan Olahan.

Dari hasil upaya peningkatan populasi dapat diuraikan jumlah populasi pada gambar berikut:



Gambar 2.3.3 Grafik Populasi Ternak Ruminansia dan Unggas

Dari gambar 2.3.3. dapat dilihat grafik trend jumlah populasi cenderung meningkat sebagai hasil dari pelaksanaan optimalisasi reproduksi terutama melalui Inseminasi Buatan. Namun pada tahun 2022, populasi ternak mengalami sedikit penurunan terutama pada ternak kerbau dan kambing. Berdasarkan angka Tahun 2022, Populasi Sapi tahun 2021 dari 209.601 ekor meningkat menjadi 210.784 ekor pada tahun 2022. Populasi kerbau tahun 2021 sebanyak 31.991 ekor turun menjadi 27.449 ekor pada tahun 2022. Populasi kambing tahun 2021 sebanyak 252.432 ekor menurun menjadi 236.228 ekor pada tahun 2022 dan populasi domba meningkat pada tahun 2022 menjadi 35.058 ekor dari sebelumnya 31.084 ekor.

Pada ternak unggas, populasi ayam buras mengalami penurunan populasi dari 6.882.281 ekor pada tahun 2021 menjadi 6.426.495 ekor pada tahun 2022, sedangkan populasi ayam ras pedaging mengalami kenaikan dari 45.490.839 ekor pada tahun 2021 menjadi 54.706.154 ekor pada tahun 2022.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Selama periode 2019-2024, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau telah mengupayakan secara optimal pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan dengan pelaksanaannya baik pusat maupun daerah. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Masalah-masalah tersebut mempengaruhi hasil yang

dicapai dalam pelaksanaan pembangunan peternakan di Provinsi Riau, setelah dilakukan diidentifikasi permasalahan maka permasalahan dihadapi dapat dilihat pada Tabel 2.3.2.

Tabel.2.3.2.Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pertumbuhan produksi daging lambat	Pertambahan populasi ternak lambat	Angka Kelahiran IB rendah
			Angka Kelahiran IB rendah
			Angka Kelahiran INKA rendah
			Jumlah bibit ternak terbatas
			Kualitas bibit ternak tidak unggul
			Kurang pakan berkualitas
		Skala usaha peternakan kecil	Terbatasnya modal usaha
			Akses permodalan usaha peternakan yang masih sulit bagi peternak
			Peternak belum berorientasi bisnis
		Prasarana produksi peternakan belum memadai	Terbatasnya anggaran untuk penyediaan prasarana
		Kompetensi SDM Peternakan yang terbatas	Petugas pelayanan reproduksi belum terlatih
			Pengetahuan dan keterampilan Petugas Lapangan Teknis terbatas
			Minimnya pengetahuan peternak tentang teknik budidaya ternak
			Terbatasnya kemampuan peternak dalam mengelola kelembagaan petani
2	Ancaman kematian ternak	Pengendalian penyakit hewan menular belum optimal	Penyakit hewan belum terpantau dengan baik
			Pelayanan veteriner belum maksimal
			Minimnya sarana prasarana Puskesmas
3	Belum semua produk Pangan Asal Hewan yang ASUH	Pengawasan pangan asal ternak ASUH belum optimal	Pelaksanaan Audit/Surveillance /Identifikasi NKV dan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan masih terbatas
			Terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM kesmavet
			Pengawasan peredaran pangan Asal Hewan belum optimal

2.3.3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Tantangan :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan hewan khususnya terhadap ternak peliharaan.
- b. Belum lengkapnya sarana prasarana Puskesmas di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
- c. Produksi daging yang dihasilkan petani belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat
- d. Para investor yang belum begitu berminat dalam berinvestasi pada sub sektor peternakan, mengingat jenis peternakan mengandung resiko tinggi (*high risk*) terutama kualitas hasil produksi yang masih rendah.

Peluang :

- a. Tersedianya SDA (Sumber Daya Alam), SDM (Sumber Daya Manusia), SDB (Sumber Daya Buatan) dalam pengembangan agribisnis peternakan;
- b. Peluang pasar ternak dan produk peternakan khususnya pasar antara pulau sangat terbuka.
- c. Tingkat konsumsi produk ternak terutama daging dan telur cukup tinggi dan cenderung sangat elastis terhadap peningkatan pendapatan penduduk;
- d. Kebijakan swasembada daging baik tingkat provinsi maupun nasional;
- e. Melemahnya potensi pasokan dari beberapa wilayah sentra produksi ternak nasional sementara konsumsi pada tingkat nasional terus mengalami peningkatan,

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program.

Dari isu-isu penting tersebut di atas selanjutnya diformulasi dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan populasi ternak
- b. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan hewan
- c. Meningkatkan produksi dan produktifitas ternak

- d. Membangun kemitraan antar stekholder dalam mengembangkan komoditas unggulan dengan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan.
- e. Meningkatnya penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal di masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD

Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD merupakan proses membandingkan antara Rancangan Akhir Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan perencanaan peternakan. Analisis kebutuhan diperoleh dengan cara menguraikan semua hasil usulan yang disampaikan melalui tahapan Pertemuan Rapat Koordinasi Teknis yang telah dilaksanakan antara Provinsi Riau dengan Kabupaten Kota yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat fisik (utama) pembangunan peternakan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan di Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Adapun kesesuaian antara Perubahan RKPD dengan kebutuhan yaitu program dan kegiatan yang tertuang didalam Renja PD memuat dari berbagai usulan kegiatan rutin dinas yang menjadi urusan tupoksi dinas teknis dan usulan dari masyarakat yang tertuang didalam pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Riau dan usulan dari Dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten dan Kota.

Dari hasil review, antara pendanaan indikatif untuk pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang ada pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD dengan analisis kebutuhan pendanaan tidak dapat perbedaan yakni sama-sama sebesar Rp. 60.837.771.066,- Tabel Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024 Provinsi Riau

Perubahan RKPD										Hasil Analisa Kebutuhan				
KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				49.280.162.949	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				49.280.162.949
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	30.654.969.510	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	30.654.969.510
3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	112.962.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	112.962.000
3	27	01	1.01	0003	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	112.962.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	112.962.000
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	5 Laporan	24.039.002.865	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	5 Laporan	24.039.002.865
3	27	01	1.02	0003	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pekanbaru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.476 Orang/Bulan	24.039.002.865	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pekanbaru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.476 Orang/Bulan	24.039.002.865
3	27	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	7 Laporan	241.193.805	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	7 Laporan	241.193.805
3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	241.193.805	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	241.193.805
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	5 Jenis Layanan	1.668.427.691	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	5 Jenis Layanan	1.668.427.691
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	54.999.227	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	54.999.227
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	596.419.214	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	511.686.754
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	201.331.160	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	201.331.160
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pekanbaru	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	94.213.801	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pekanbaru	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	94.213.801
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	721.464.289	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	721.464.289
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	4 Jenis	3.763.793.149	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	4 Jenis	3.794.693.149
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.280.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.280.000

Rancangan Akhir Perubahan RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan							
KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	970.569.784	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	970.569.784
3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	95.400.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	95.400.000
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.692.543.365	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.692.543.365
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	3 Jenis Barang	829.590.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	3 Jenis Barang	829.590.000
3	27	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.030.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.030.000
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	758.510.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	758.510.000
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	27.050.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	27.050.000
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Peningkatan Populasi Ternak	1.85 Persen	10.042.141.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Peningkatan Populasi Ternak	1.85 Persen	10.042.141.000
3	27	02	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		Jumlah kelompok yang mengembangkan SDGH	2 Kelompok	300.940.000	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		Jumlah kelompok yang mengembangkan SDGH	2 Kelompok	300.940.000
3	27	02	1.03	0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Kuansing, Inhu & Kampar	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	1 Laporan	300.940.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Kuansing, Inhu & Kampar	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	1 Laporan	300.940.000
3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Jumlah produksi pakan unggul	1.350 Ton	67.065.000	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Jumlah produksi pakan unggul	1.350 Ton	67.065.000
3	27	02	1.04	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Kuansing, Inhu, Inhil, Pelalawan, Siak, Dumai, Rohil, Bengkalis & Meranti	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Laporan	67.065.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Kuansing, Inhu, Inhil, Pelalawan, Siak, Dumai, Rohil, Bengkalis & Meranti	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Laporan	67.065.000

Rancangan Akhir Perubahan RKPD										Hasil Analisa Kebutuhan				
KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	27	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		Persentase Angka kelahiran	13.2 Persen	1.631.523.000	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		Persentase Angka kelahiran	13.2 Persen	1.631.523.000
3	27	02	1.05	0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	12 Kab/Kota	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	1 Laporan	82.210.000	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	12 Kab/Kota	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	1 Laporan	82.210.000
3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	12 Kab/Kota	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	12 Laporan	1.440.085.000	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	12 Kab/Kota	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	12 Laporan	1.440.085.000
3	27	02	1.05	0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan		Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar	5 dokumen	109.228.000	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan		Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar	5 dokumen	109.228.000
3	27	02	1.07		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		Jumlah Bibit Ternak yang disediakan	535 ST	8.042.613.000	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		Jumlah Bibit Ternak yang disediakan	535 ST	8.042.613.000
3	27	02	1.07	0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	12 Kab/Kota	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	42.165 Ekor	8.042.613.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	12 Kab/Kota	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	42.165 Ekor	8.042.613.000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan	27 Persen	1.647.313.500	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan	27 Persen	1.647.313.500
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian		Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana	27 Persen	1.647.313.500	Penataan Prasarana Pertanian		Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana	27 Persen	1.647.313.500
3	27	03	1.01	0019	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Kuansing, Inhu, Pelalawan, Kampar, Bengkalis & Meranti	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	22 Unit	1.647.313.500	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Kuansing, Inhu, Pelalawan, Kampar, Bengkalis & Meranti	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	22 Unit	1.647.313.500
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase angka kematian ternak	2.2 Persen	4.220.515.046	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase angka kematian ternak	2.2 Persen	4.220.515.046
							Persentase peningkatan unit usaha penyedia produk hewan yang menerapkan penjaminan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan	10 Persen	427.930.204			Persentase peningkatan unit usaha penyedia produk hewan yang menerapkan penjaminan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan	10 Persen	427.930.204
3	27	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase penurunan kasus PHMS (%)	10 Persen	3.517.733.970	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase penurunan kasus PHMS (%)	10 Persen	3.517.733.970
3	27	04	1.01	0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	12 Kab/Kota	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	12 Wilayah	209.519.900	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	12 Kab/Kota	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	12 Wilayah	209.519.900

Rancangan Akhir Perubahan RKPD										Hasil Analisa Kebutuhan				
KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(3)	(5)	(7)	(2)	(3)	(3)	(5)	(7)
3	27	04	1.01	0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	12 Kab/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	36 Laporan	3.308.209..070	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	12 Kab/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	36 Laporan	3.308.209..070
3	27	04	1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi		Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point	90 Persen	702.781.076	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi		Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point	90 Persen	702.781.076
3	27	04	1.02	0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Kuansing, Inhil, Kampar, Rohul, Rohil	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	60 Laporan	702.781.076	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Kuansing, Inhil, Kampar, Rohul, Rohil	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	60 Laporan	702.781.076
3	27	04	1.04		Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan NKV (Unit)	29 Unit	427.930.204	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan NKV (Unit)	29 Unit	427.930.204
3	27	04	1.04	0003	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	12 Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	56 Dokumen	328.690.340	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan	12 Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	56 Dokumen	328.690.340
3	27	04	1.04	0004	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	12 Kab/Kota	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	30 Orang	99.239.864	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	12 Kab/Kota	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	30 Orang	99.239.864
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase kelompok yang membentuk korporasi	9 Persen	2.287.298.689	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase kelompok yang membentuk korporasi	9 Persen	2.287.298.689
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah kelompok yang dinaikkan status kelas kelompoknya	77 Kelompok	2.004.757.435	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah kelompok yang dinaikkan status kelas kelompoknya	77 Kelompok	2.004.757.435
3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	12 Kab/Kota	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	661 Kelompok	2.004.757.435	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	12 Kab/Kota	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	661 Kelompok	2.004.757.435
3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah kelompok yang menerapkan sistem agribisnis	60 Kelompok	282.541.254	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah kelompok yang menerapkan sistem agribisnis	60 Kelompok	282.541.254
3	27	07	1.03	0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Kuansing, Inhu, Kampar	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	2 Unit	282.541.254	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Kuansing, Inhu, Kampar	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	2 Unit	282.541.254
Jumlah									49.280.162.949					49.280.162.949

UPT.Inseminasi Buatan Ternak

Rancangan Akhir Perubahan RKPD										Hasil Analisa Kebutuhan				
K O				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			
							Target	Pagu Indikatif (Rp)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				3.427.941.633	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				3.427.941.633	
27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	300.897.360	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	300.897.360	
27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	1 Jenis Layanan	20.994.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	1 Jenis Layanan	20.994.000	
27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.994.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.994.000	
27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	1 Jenis	279.903.360	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	1 Jenis	279.903.360	
27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	279.903.360	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	279.903.360	
27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Peningkatan Populasi Ternak	1.85 Persen	2.154.404.100	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Peningkatan Populasi Ternak	1.85 Persen	2.154.404.100	
27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Jumlah Semen Beku Yang Memenuhi SNI (Dosis)	55.000 Dosis	2.078.156.100	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Jumlah Semen Beku Yang Memenuhi SNI (Dosis)	55.000 Dosis	2.078.156.100	
27	02	1.04	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pekanbaru	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	12 Laporan	2.078.156.100	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pekanbaru	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	12 Laporan	2.078.156.100	
27	02	1.07		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		Jumlah Sapi Bull yang diadakan (Ekor)	0 Ekor	76.248.000	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		Jumlah Sapi Bull yang diadakan (Ekor)	0 Ekor	76.248.000	
27	02	1.07	0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pekanbaru	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	0 Ekor	76.248.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pekanbaru	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	0 Ekor	76.248.000	
27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan	27 Persen	972.640.173	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan	27 Persen	972.640.173	
27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian		Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)	74 Persen	972.640.173	Penataan Prasarana Pertanian		Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)	74 Persen	972.640.173	
27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Pekanbaru	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	972.640.173	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Pekanbaru	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	972.640.173	
Jumlah								3.427.941.633					3.427.941.633	

Rancangan Akhir Perubahan RKPD										Hasil Analisa Kebutuhan					
KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				4.794.066.924	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				4.794.066.924	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	1.538.400.395	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	1.538.400.395	
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	3 Jenis Layanan	430.737.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	3 Jenis Layanan	430.737.000	
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	387.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	387.500.000	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.250.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.250.000	
3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	14.987.000	Penyediaan Bahan/Material	Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	14.987.000	
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	3 Jenis Barang	605.084.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	3 Jenis Barang	605.084.000	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	413.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	413.500.000	
3	27	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	6.584.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	6.584.000	
3	27	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	185.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	185.000.000	
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 Jenis	461.007.520	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 Jenis	461.007.520	
3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	50.000.000	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	411.007.520	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	411.007.520	
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	3 Jenis	41.571.875	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	3 Jenis	41.571.875	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	14.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	14.000.000	
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	2.571.875	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	2.571.875	

Rancangan Akhir Perubahan RKPD										Hasil Analisa Kebutuhan				
KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)		(3)	(5)	(7)	(2)		(3)	(5)	(7)
3	27	01	1.09	0013	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	25.000.000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan	27 Persen	441.253.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN		Persentase sentra komoditas peternakan yang	27 Persen	441.253.000
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian		Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)	76 Persen	441.253.000	Penataan Prasarana Pertanian		Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)	76 Persen	441.253.000
3	27	03	1.01	0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Pekanbaru	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	0 Unit	15.637.000	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Pekanbaru	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	0 Unit	15.637.000
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Pekanbaru	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	3 Unit	425.616.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Pekanbaru	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	3 Unit	425.616.000
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase angka kematian ternak	2.20 Persen	2.814.413.529	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase angka kematian ternak	2.20 Persen	2.814.413.529
3	27	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase penurunan kasus PHMS (%)	10 Persen	1.412.211.756	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase penurunan kasus PHMS (%)	10 Persen	1.412.211.756
3	27	04	1.01	0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Pekanbaru	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	12 Laporan	1.412.211.756	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Pekanbaru	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	12 Laporan	1.412.211.756
3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		Jumlah unit usaha yang menerapkan persyaratan teknis Keswan kesmavet	25 Unit	1.402.201.773	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		Jumlah unit usaha yang menerapkan persyaratan teknis Keswan kesmavet	25 Unit	1.402.201.773
3	27	04	1.03	0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pekanbaru	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	270 Dokumen	1.402.201.773	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pekanbaru	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	270 Dokumen	1.402.201.773
Jumlah									4.794.066.924					4.794.066.924

Rancangan Akhir Perubahan RKPD										Hasil Analisa Kebutuhan				
KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				3.335.599.560	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				3.335.599.560
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	835.505.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	835.505.000
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	3 Jenis Layanan	258.440.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	3 Jenis Layanan	258.440.000
3	27	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kampar, Siak Hulu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kampar, Siak Hulu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kampar, Siak Hulu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.320.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kampar, Siak Hulu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.320.000
3	27	01	1.06	0009	Penyediaan Bahan/Material	Kampar, Siak Hulu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	137.120.000	Penyediaan Bahan/Material	Kampar, Siak Hulu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	137.120.000
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	1 Jenis Barang	30.400.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	1 Jenis Barang	30.400.000
3	27	01	1.07	0000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kampar, Siak Hulu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	30.400.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kampar, Siak Hulu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	30.400.000
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	3 Jenis	496.665.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	3 Jenis	496.665.000
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kampar, Siak Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	48.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kampar, Siak Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	48.000.000
3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kampar, Siak Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	28.810.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kampar, Siak Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	28.810.000
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kampar, Siak Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	419.855.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kampar, Siak Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	419.855.000
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	1 Jenis	50.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	1 Jenis	50.000.000
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kampar, Siak Hulu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kampar, Siak Hulu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	50.000.000

Rancangan Akhir Perubahan RKPD										Hasil Analisa Kebutuhan				
KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)		(3)	(5)	(7)	(2)		(3)	(5)	(7)
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Peningkatan Populasi Ternak	1.85 Persen	1.435.402.560	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Peningkatan Populasi Ternak	1.85 Persen	1.435.402.560
3	27	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		Jumlah Bibit ternak yang ber SKLB di UPT	20 Ekor	1.435.402.560	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		Jumlah Bibit ternak yang ber SKLB di UPT	20 Ekor	1.435.402.560
3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Kampar, Siak Hulu	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	12 Laporan	1.435.402.560	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Kampar, Siak Hulu	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	12 Laporan	1.435.402.560
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan	27 Persen	1.064.692.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN		Persentase sentra komoditas peternakan yang	27 Persen	1.064.692.000
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian		Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)	63 Persen	1.064.692.000	Penataan Prasarana Pertanian		Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)	63 Persen	1.064.692.000
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Kampar, Siak Hulu	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	4 Unit	1.064.692.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Kampar, Siak Hulu	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	4 Unit	1.064.692.000
Jumlah									3.335.599.560					3.335.599.560
Total Jumlah									60.837.771.066					60.837.771.066

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2024 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah maupun menunjang terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024 antara lain adanya penyesuaian anggaran atau rasionalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau yang disesuaikan dengan kebutuhan yang bersifat skala prioritas.

APBD Provinsi Riau Tahun 2024 pagu anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebesar Rp. 62.577.464.408,- . dan pada Rancangan Akhir RKPD Perubahan tahun 2024, pagu indikatif Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menjadi Rp. 60.837.771.066,-.

Pagu tersebut dalam rangka mendukung program utama sebanyak 4 program dan 1 program penunjang. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta anggaran per sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.3.Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Riau

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu (Rp.)		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	APBD 2024	Rancangan Akhir Perubahan RKPD Perubahan Tahun 2024		Tolok Ukur	Target	
(1)	(2)				(3)		(4)	(5)	(6)	(7)		8	9	10
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					47.555.554.693	49.280.162.949			54.431.500.000
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	27.296.702.703	30.654.969.510		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	32.831.500.000
3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	131.543.400	112.962.000		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	200.000.000
3	27	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4 Dokumen	131.543.400	112.962.000	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	200.000.000
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	5 Laporan	5 Laporan	20.954.871.988	24.039.002.865		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	5 Laporan	25.000.000.000
3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.404 Orang/Bulan	1.476 Orang/Bulan	20.954.871.988	24.039.002.865	Pekanbaru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.440 Orang/Bulan	25.000.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu (Rp.)		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	APBD 2024	Rancangan Akhir Perubahan RKPD PerubahanTahun 2024		Tolok Ukur	Target	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		8	9	10
3	27	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	7 Laporan	7 Laporan	241.193.805	241.193.805		Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	7 Laporan	175.000.000
3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	241.193.805	241.193.805	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	175.000.000
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	5 Jenis Layanan	5 Jenis Layanan	1.390.140.677	1.668.427.691		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	6 Jenis Layanan	1.865.000.000
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	54.999.227	54.999.227	Pekanbaru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	65.000.000
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	413.456.754	596.419.214	Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	200.000.000
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	201.331.160	201.331.160	Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	750.000.000
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	157.408.536	94.213.801	Pekanbaru	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	150.000.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu (Rp.)		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	APBD 2024	Rancangan Akhir Perubahan RKPD Perubahan Tahun 2024		Tolok Ukur	Target	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		8	9	10
												yang Disediakan		
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	562.945.000	721.464.289	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	700.000.000
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	4 Jenis	4 Jenis	3.892.922.833	3.763.793.149		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	4 Jenis	4.631.500.000
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5.280.000	5.280.000	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.500.000
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.099.699.468	970.569.784	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.250.000.000
3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	95.400.000	95.400.000	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	125.000.000
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.692.543.365	2.692.543.365	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.250.000.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu (Rp.)		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	APBD 2024	Rancangan Akhir Perubahan RKPD PerubahanTahun 2024		Tolok Ukur	Target	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		8	9	10
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	3 Jenis Barang	6 Jenis Barang	686.030.000	829.590.000		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	6 Jenis	960.000.000
3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	44.030.000	44.030.000	Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	60.000.000
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	19 Unit	614.950.000	758.510.000	Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	850.000.000
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit	27.050.000	27.050.000	Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	50.000.000
												0		
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	1.85 Persen	1.85 Persen	11.144.326.877	10.042.141.000		Persentase Peningkatan Populasi Ternak		9.800.000.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
							Target 2024		Pagu (Rp.)		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	APBD 2024	Rancangan Akhir Perubahan RKPD PerubahanTahun 2024		Tolok Ukur	Target	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		8	9	10
3	27	02	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah kelompok yang mengembangkan SDGH	2 Kelompok	2 Kelompok	350.000.000	300.940.000		Jumlah kelompok yang mengembangkan SDGH	2 Kelompok	500.000.000
3	27	02	1.03	0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	1 Laporan	1 Laporan	350.000.000	300.940.000	Kuansing, Inhu & Kampar	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	1 Laporan	500.000.000
3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah produksi pakan unggul	1.350 Ton	1.350 Ton	624.803.877	67.065.000		Jumlah produksi pakan unggul	3.150 Ton	800.000.000
3	27	02	1.04	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	624.803.877	67.065.000	Kuansing, Inhu, Inhil, Pelalawan, Siak, Dumai, Rohil, Bengkalis & Meranti	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Laporan	800.000.000
3	27	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan	Persentase Angka kelahiran	13.2 Persen	13.2 Persen	1.995.385.000	1.631.523.000		Persentase Angka kelahiran	13.3 Persen	3.500.000.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu (Rp.)		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	APBD 2024	Rancangan Akhir Perubahan RKPD PerubahanTahun 2024		Tolok Ukur	Target	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		8	9	10
					Provinsi									
3	27	02	1.05	0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	1 Laporan	1 Laporan	161.555.000	82.210.000	12 Kab/Kota	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	3 Laporan	300.000.000
3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	12 Laporan	12 Laporan	1.711.070.000	1.440.085.000	12 Kab/Kota	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 Laporan	3.000.000.000
3	27	02	1.05	0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar	300 dokume n	5 dokumen	122.760.000	109.228.000	-	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar	-	200.000.000
3	27	02	1.07		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit Ternak yang disediakan	340 ST	535 ST	8.174.138.000	8.042.613.000		Jumlah Bibit Ternak yang disediakan	182 ST	5.000.000.000
3	27	02	1.07	0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	34.000 Ekor	42.165 Ekor	8.174.138.000	8.042.613.000	12 Kab/Kota	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	5.132 Ekor	5.000.000.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
							Target 2024		Pagu (Rp.)		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	APBD 2024	Rancangan Akhir Perubahan RKPD PerubahanTahun 2024		Tolok Ukur	Target	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		8	9	10
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan	27 Persen	27 Persen	1.701.863.500	1.647.313.500		Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan	12 Persen	2.800.000.000
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana	27 Persen	27 Persen	1.701.863.500	1.647.313.500		Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana	20 Persen	2.800.000.000
3	27	03	1.01	0019	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	22 Unit	1.701.863.500	1.647.313.500	Inhu, Pelalawan, Siak, Kampar & Rohul	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	900 Ha	2.800.000.000
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase angka kematian ternak	2.2 Persen	2.2 Persen	4.662.532.720	4.220.515.046		Persentase angka kematian ternak	2.15 Persen	5.200.000.000
						Persentase peningkatan unit usaha penyedia produk hewan yang menerapkan penjaminan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan	10 Persen	10 Persen	462.830.204	427.930.204		Persentase peningkatan unit usaha penyedia produk hewan yang menerapkan penjaminan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan	10 Persen	650.000.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
							Target 2024		Pagu (Rp.)		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	APBD 2024	Rancangan Akhir Perubahan RKPD PerubahanTahun 2024		Tolok Ukur	Target	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		8	9	10
3	27	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase penurunan kasus PHMS (%)	10 Persen	10 Persen	3.959.733.970	3.517.733.970		Persentase penurunan kasus PHMS (%)	10 Persen	4.350.000.000
3	27	04	1.01	0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	24 Wilayah	12 Wilayah	209.519.900	209.519.900	12 Kab/Kota	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	12 Wilayah	350.000.000
3	27	04	1.01	0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	36 Laporan	36 Laporan	3.750.214.070	3.308.214.070	12 Kab/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	36 Laporan	4.000.000.000
3	27	04	1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point	90 Persen	90 Persen	702.798.750	702.781.076		Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point	90 Persen	850.000.000
3	27	04	1.02	0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	60 Laporan	60 Laporan	702.798.750	702.781.076	Kuansing, Inhil, Kampar, Rohul, Rohil	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran	60 Laporan	850.000.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu (Rp.)		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	APBD 2024	Rancangan Akhir Perubahan RKPD PerubahanTahun 2024		Tolok Ukur	Target	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		8	9	10
												HPM		
3	27	04	1.04		Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan NKV (Unit)	29 Unit	29 Unit	462.830.204	427.930.204		Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan NKV (Unit)		650.000.000
3	27	04	1.04	0003	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	56 Dokume n	56 Dokumen	328.710.340	328.690.340	12 Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	-	550.000.000
3	27	04	1.04	0004	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	30 Orang	30 Orang	134.119.864	99.239.864	12 Kab/Kota	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	-	100.000.000
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok yang membentuk korporasi	9 Persen	9 Persen	2.287.298.689	2.287.298.689		Persentase kelompok yang membentuk korporasi	15 Persen	3.150.000.000
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok yang dinaikkan status kelas kelompoknya	77 Kelomp ok	77 Kelompok	2.004.757.435	2.004.757.435		Jumlah kelompok yang dinaikkan	50 Kelompok	2.750.000.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu (Rp.)		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	APBD 2024	Rancangan Akhir Perubahan RKPD PerubahanTahun 2024		Tolok Ukur	Target	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		8	9	10
												status kelas kelompoknya		
3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	661 Kelomp ok	661 Kelompok	2.004.757.435	2.004.757.435	12 Kab/Kota	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	661 Kelompok	2.750.000.000
3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok yang menerapkan sistem agribisnis	60 Kelomp ok	60 Kelompok	282.541.254	282.541.254		Jumlah kelompok yang menerapkan sistem agribisnis		400.000.000
3	27	07	1.03	0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	2 Unit	2 Unit	282.541.254	282.541.254	Kuansing, Inhu, Kampar	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	2 Unit	400.000.000
Jumlah									47.555.554.693	49.280.162.949				54.431.500.000

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0001 UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu (Rp.)		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	APBD 2024 (Pergeseran APBD IV)	Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024		Tolok Ukur	Target	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		8	9	10
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				5.525.600.108	3.427.941.633				6.272.000.000
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	300.897.360	300.897.360		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	322.000.000
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	1 Jenis Layanan	1 Jenis Layanan	20.994.000	20.994.000		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	1 Jenis Layanan	22.000.000
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.994.000	20.994.000	Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.000.000
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	1 Jenis	1 Jenis	279.903.360	279.903.360		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	1 Jenis	300.000.000
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	279.903.360	279.903.360	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu (Rp.)		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	APBD 2024 (Pergeseran APBD IV)	Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024		Tolok Ukur	Target	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		8	9	10
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	1.85 Persen	1.85 Persen	2.462.576.100	2.154.404.100		Persentase Peningkatan Populasi Ternak	3 Persen	3.450.000000
3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Semen Beku Yang Memenuhi SNI (Dosis)	55.000 Dosis	55.000 Dosis	2.702.959.977	2.078.156.100		Jumlah Semen Beku Yang Memenuhi SNI (Dosis)	62.000 Dosis	3.000.000.000
3	27	02	1.04	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	12 Laporan	12 Laporan	2.078.156.100	2.078.156.100	Pekanbaru	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	12 Laporan	3.000.000.000
3	27	02	1.07		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Sapi Bull yang diadakan (Ekor)	6 Ekor	0 Ekor	384.420.000	76.248.000		Jumlah Sapi Bull yang diadakan (Ekor)	6 Ekor	450.000.000
3	27	02	1.07	0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	6 Ekor	0 Ekor	384.420.000	76.248.000	Pekanbaru	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	6 Ekor	450.000.000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan	27 Persen	27 Persen	2.762.126.648	972.640.173		Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan	12 Persen	2.500.000.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu (Rp.)		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	APBD 2024 (Pergeseran APBD IV)	Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024		Tolok Ukur	Target	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		8	9	10
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)	74 Persen	74 Persen	2.762.126.648	972.640.173		Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)	76 Persen	2.500.000.000
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	6 Unit	1 Unit	2.762.126.648	972.640.173	Pekanbaru	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	5 Unit	2.500.000.000
Jumlah									5.525.600.108	3.427.941.633				6.272.000.000

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0004 UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu (Rp.)		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menja di	APBD 2024 (Pergeseran APBD IV)	Perubahan RKPD Tahun 2024		Tolok Ukur	Target	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		8	9	10
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				6.125.710.047	4.794.066.924				8.655.000.000
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	1.930.494.518	1.538.400.395		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	2.855.000.000
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	3 Jenis Layana n	3 Jenis Layan an	430.737.000	430.737.000		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	3 Jenis Layanan	565.000.000
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	387.500.000	387.500.000	Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	500.000.000
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	28.250.000	28.250.000	Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000
3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.987.000	14.987.000	Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	35.000.0000
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	3 Jenis Barang	3 Jenis Baran g	918.500.000	605.084.000		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	3 Jenis Barang	1.550.000.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu (Rp.)		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menja di	APBD 2024 (Pergeseran APBD IV)	Perubahan RKPD Tahun 2024		Tolok Ukur	Target	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		8	9	10
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	17 Unit	653.500.000	413.500.000	Pekanbar u	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	750.000.000
3	27	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	80.000.000	6.584.000	Pekanbar u	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	500.000.000
3	27	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	103 Unit	3 Unit	185.000.000	185.000.000	Pekanbar u	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	300.000.000
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 Jenis	2 Jenis	461.007.520	461.007.520		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 Jenis	565.000.000
3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lapora n	1 Lapora n	50.000.000	50.000.000	Pekanbar u	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	34.000.000
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lapora n	12 Lapora n	411.007.520	411.007.520	Pekanbar u	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	500.000.000
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	120.249.998	41.571.875		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	3 Jenis	175.0000000
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	17 Unit	14.000.000	14.000.000	Pekanbar u	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	25.000.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu (Rp.)		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menja di	APBD 2024 (Pergeseran APBD IV)	Perubahan RKPD Tahun 2024		Tolok Ukur	Target	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		8	9	10
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0 Unit	31.249.998	2.571.875	Pekanbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000
3	27	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	21 Unit	75.000.000	25.000.000	Pekanbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan	27 Persen	27 Persen	780.802.000	441.253.000		Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan	12 Persen	1.300.000.000
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)	76 Persen	76 Persen	780.802.000	441.253.000		Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)	78 Persen	200.000.000
3	27	03	1.01	0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	3 Unit	0 Unit	190.000.000	15.637.000	Pekanbaru	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	1 Unit	300.000.000
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	4 Unit	3 Unit	590.802.000	425.616.000	Pekanbaru	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	1.000.000.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu (Rp.)		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menja di	APBD 2024 (Pergeseran APBD IV)	Perubahan RKPD Tahun 2024		Tolok Ukur	Target	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		8	9	10
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase angka kematian ternak	2.20 Persen	2.20 Persen	3.414.413.529	2.814.413.529		Persentase angka kematian ternak	2.15 Persen	4.500.000.000
3	27	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase penurunan kasus PHMS (%)	10 Persen	10 Persen	2.012.211.756	1.412.211.756		Persentase penurunan kasus PHMS (%)	10 Persen	2.750.000.000
3	27	04	1.01	0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	12 Lapora n	12 Lapora n	2.012.211.756	1.412.211.756	Pekanbar u	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	12 Laporan	2.750.000.000
3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha yang menerapkan persyaratan teknis Keswan kesmavet	25 Unit	25 Unit	1.402.201.773	1.402.201.773		Jumlah unit usaha yang menerapkan persyaratan teknis Keswan kesmavet	30 Unit	1.750.000.000
3	27	04	1.03	0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	270 Dokum en	270 Doku men	1.402.201.773	1.402.201.773	Pekanbar u	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	300 Dokume n	1.750.000.000
Jumlah									6.125.710.047	4.794.066.924				8.655.000.000

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0005 UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu (Rp.)		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	APBD 2024 (Pergeseran APBD IV)	Perubahan RKPD Tahun 2024		Tolok Ukur	Target	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		8	9	10
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				3.370.599.560	3.335.599.560				4.407.000.000
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	870.505.000	835.505.000		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	1.157.000.000
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	3 Jenis Layanan	3 Jenis Layanan	258.440.000	258.440.000		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	3 Jenis Layanan	272.000.000
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000	100.000.000	Kampar, Siak Hulu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	100.000.000
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	21.320.000	21.320.000	Kampar, Siak Hulu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	22.000.000
3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	137.120.000	137.120.000	Kampar, Siak Hulu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	150.000.000
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	1 Jenis Barang	1 Jenis Barang	30.400.000	30.400.000		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	1 Jenis Barang	100.000.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu (Rp.)		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	APBD 2024 (Pergeseran APBD IV)	Perubahan RKPD Tahun 2024		Tolok Ukur	Target	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		8	9	10
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5 Unit	30.400.000	30.400.000	Kampar, Siak Hulu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	100.000.000
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	3 Jenis	3 Jenis	531.665.000	496.665.000		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	3 Jenis	715.000.000
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	48.000.000	48.000.000	Kampar, Siak Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	185.000.000
3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	28.810.000	28.810.000	Kampar, Siak Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	454.855.000	419.855.000	Kampar, Siak Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	500.000.000
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	1 Jenis	1 Jenis	50.000.000	50.000.000		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	1 Jenis	70.000.000
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	50.000.000	50.000.000	Kampar, Siak Hulu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	70.000.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu (Rp.)		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	APBD 2024 (Pergeseran APBD IV)	Perubahan RKPD Tahun 2024		Tolok Ukur	Target	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		8	9	10
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	1.85 Persen	1.85 Persen	1.435.402.560	1.435.402.560		Persentase Peningkatan Populasi Ternak	3 Persen	1.750.000.000
3	27	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bibit ternak yang ber SKLB di UPT	20 Ekor	20 Ekor	1.435.402.560	1.435.402.560		Jumlah Bibit ternak yang ber SKLB di UPT	20 Ekor	1.750.000.000
3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	12 Laporan	12 Laporan	1.435.402.560	1.435.402.560	Kampar, Siak Hulu	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	12 Laporan	1.750.000.000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan	27 Persen	27 Persen	1.064.692.000	1.064.692.000		Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan	12 Persen	1.500.000.000
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)	63 Persen	63 Persen	1.064.692.000	1.064.692.000		Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)	65 Persen	1.500.000.000
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	1.064.692.000	1.064.692.000	Kampar, Siak Hulu	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	12 Unit	1.500.000.000
Jumlah									3.370.599.560	3.335.599.560				4.407.000.000
TOTAL JUMLAH									62.577.464.408	60.837.771.066				73.765.500.000

Dari Tabel 3.1. dapat dijelaskan dan uraikan sebagai berikut :

A. Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Tidak Mengalami Perubahan

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya

2) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- a) Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
- b) Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan lainnya (HPM)

3). Program Penyuluhan Pertanian

- a) Kegiatan Pengembangan penerapan Penyuluhan Pertanian
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani

- b) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
 - Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani

Sedangkan di UPT terdapat kegiatan dan sub kegiatan yang tidak mengalami perubahan yakni :

a. UPT. Inseminasi Buatan Ternak (UPT.IBT)

Sub Kegiatan yang tidak mengalami pergeseran ataupun perubahan baik indikator, target indikator maupun pagunya adalah :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- b) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- a) Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/ bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi

b. UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan (UPT. LVKH)

Sub Kegiatan yang tidak mengalami perubahan baik indikator, target indikator maupun pagunya pada UPT. LVKH adalah :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material
- b) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- a) Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah kabupaten/Kota Dalam satu daerah provinsi
 - Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan HEwan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

c. UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan (UPT. PTP)

Sub Kegiatan yang tidak mengalami perubahan baik indikator, target indikator maupun pagunya pada UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan adalah :

1)Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkaoan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
- b) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
- d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- a) kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan hijauan Pakan Ternak

3). Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- a) Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian
 - Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya

B. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mengalami Pergeseran atau Perubahan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, terjadi pengurangan target dari 5 dokumen menjadi 4 dokumen dan pengurangan pagu dari Rp.131.543.400,- menjadi Rp. 112.962.000,- .berkurang sebesar Rp.18.581.400,-
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.3.084.130.877,- dari Rp.20.954.871.988,- menjadi Rp.24.039.002.865,- dan perubahan target indikator dari 1.404 Orang/Bulan menjadi 1.476 Orang/Bulan. Perubahan target disesuaikan dengan jumlah pegawai dan anggaran disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan hingga akhir tahun 2024.
- c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 182.962.460 dari 413.456.754 menjadi Rp. 596.419.214,- dan penambahan target dari 2 paket menjadi 3 paket. Penambahan anggaran untuk Pengadaan CCTV, UPS router & Komputer, Brankas UPT. LVKH.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, mengalami pengurangan anggaran dari Rp. 157.408.536,- menjadi Rp. 94.213.801,- .

- Sub Kegiatan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 192.162.947,- sehingga anggaran yang awalnya Rp.562.945.000,- menjadi Rp.721.464.289,-.
- d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, mengalami pengurangan anggaran dari Rp.1.099.699.468,- menjadi Rp.970.569.784,-.
- e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.143.560.000,- yang digunakan untuk penambahan service mobil sehingga anggaran berubah dari Rp.614.950.000 menjadi Rp.758.510.000 dan perubahan target dari 16 unit menjadi 19 unit.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- a). Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Provinsi.
 - Sub Kegiatan pengembangan dan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan dengan pengurangan sebesar Rp.49.060.000,- sehingga anggaran berubah dari Rp.350.000.000,- menjadi Rp. 300.940.000,-
- b). Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi. Sub kegiatan ini mengalami pengurangan anggaran rasionalisasi Silase Baller & Bimtek sebesar Rp. 557.738.877,- sehingga anggaran yang semula Rp. 624.803.877,- menjadi Rp.67.065.000,-.
- c). Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi.
 - Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak mengalami pengurangan anggaran yang semula

Rp.1.771.07.000,- menjadi Rp. 1.440.085.000,- dengan target kinerja tetap 12 laporan.

- Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.79.345.000,- yang semula Rp.161.555.000,- menjadi Rp.82.210.000,- dengan target kinerja tetap 1 (satu) laporan. Pengurangan anggaran berkaitan dengan perjalanan dinas.
- Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.13.532.000,- sehingga awalnya pagu sebesar Rp. 122.760.000 berkurang menjadi Rp. 109.228.000,-. Anggaran yang dikurangi adalah anggaran perjalanan dinas. Target kinerja berubah dari 300 dokumen menjadi 5 dokumen. Dengan ditetapkannya Pemutakhiran Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 menjadi Kepmendagri Nomor 900.1.15.5.-1317 tahun 2023 yang di dalamnya terdapat perubahan satuan indikator untuk Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang beredar dari yang semula satuannya Ton menjadi Dokumen. Pada penyusunan Renja Tahun 2024 satuannya sudah disesuaikan namun target tidak disesuaikan sehingga yang seharusnya targetnya 5 Dokumen menjadi 300 dokumen. Pada Perubahan renja target disesuaikan menjadi 5 Dokumen.

d). Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

- Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain. Kegiatan ini mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 131.525.000,- yang awalnya sebesar Rp.8.174.138.000,- berkurang menjadi Rp. 8.042.613.000,- dan perubahan target jumlah bibit yang disediakan dari 34.000 ekor menjadi 42.165 ekor. Pengurangan anggaran berupa rasionalisasi Perjalanan Dinas Monev, Pembinaan & AUTS.

c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

a). Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian

- Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pasca Panen Peternakan. Sub kegiatan ini mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 54.550.000,-

dari anggaran Rp. 1.701.863.500,- menjadi Rp.1.647.313.500,- dan target yang juga berubah dari 1 unit menjadi 22 unit. Dengan ditetapkannya Pemutakhiran Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 menjadi Kepmendagri Nomor 900.1.15.5.-1317 tahun 2023 yang di dalamnya terdapat perubahan satuan indikator untuk Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pasca Panen Peternakan dari yang semula satuannya Dokumen menjadi Unit. Pada penyusunan Renja Tahun 2024 satuannya sudah disesuaikan namun target belum disesuaikan sehingga yang seharusnya targetnya 22 unit menjadi 1 unit sesuai dengan target dokumen 1 unit. Pada Perubahan renja target disesuaikan menjadi 22 unit.

d. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

a). Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- Sub kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1(satu) Daerah Provinsi mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.442.000.000,- dari semula Rp.3.750.214.070,- menjadi Rp.3.308.214.070,-

b). Kegiatan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

- Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 20.000,- .
- Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan mengalami pengurangan anggaran dari Rp.134.119.864,- menjadi Rp. 99.239.864,-.

Pada UPT Lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang mengalami pergeseran ataupun perubahan adalah sebagai berikut :

a). UPT Inseminasi Buatan Ternak (UPT.IBT)

- Sub Kegiatan Pengadaan Benih Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain mengalami pengurangan anggaran dari Rp.384.420.000,- menjadi Rp.76.248.000,- dan perubahan target dari 7 ekor Sapi Bull yang diadakan menjadi 0 ekor.
- Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Pendukungnya mengalami pengurangan anggaran dari Rp. 2.762.126.648,- menjadi Rp. 972.640.173,- dan perubahan target dari 6 unit menjadi 1 unit. Rasionalisasi pada kandang, rumah penjaga, pagar, dan pengurangan volume turap.

b). UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan

- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.240.000.000,- dari sebelumnya sebesar Rp.653.500.000,- menjadi Rp.413.500.000 ,-. Pengurangan terjadi pada anggaran pembelian UPS.
- Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 73.416.000,- sehingga anggaran menjadi tinggal Rp.6.584.000,- dari awalnya Rp.80.000.000,-. Dan target anggaran merubah dari 1 unit menjadi 0 unit karena Pembangunan Pos Security tidak jadi dianggarkan karena mengalami rasionalisasi.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.28.678.123,- dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.31.249.998,- menjadi Rp.2.571.875,-. Dan perubahan target dari 3 unit menjadi 0 unit.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.75.000.000,- menjadi Rp.25.000.000,-. Dan perubahan target dari 25 unit menjadi 21 unit.
- Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian mengalami pengurangan anggaran dari Rp.190.000.000,- menjadi Rp. 15.637.000,- dan perubahan target dari 3 unit menjadi 0 unit.
- Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya mengalami pengurangan

anggaran sebesar Rp.165.186.000,- sehingga anggaran berubah dari Rp 590.802.000,- menjadi Rp.425.616.000,- dan perubahan target dari 4 unit menjadi 3 unit.

- Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.600.000.000,- sehingga anggaran berubah dari Rp.2.012.211.756 menjadi Rp.1.412.211.756,- dengan target kinerja tetap 12 Laporan

c). UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.35.000.000,- sehingga anggaran yang semula Rp. 454.855.000,- menjadi Rp. 419.855.000,- dengan target kinerja tetap 12 Laporan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah. Program, kegiatan dan Sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercatum dalam Rancangan RKPD Provinsi Riau Tahun 2024 dan Rancangan RKPD Perubahan Provinsi Riau Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi, Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya operasional dan strategis yaitu menjembatani antara Perencanaan pada Perangkat daerah dengan Rencana kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis Jangka Menengah daerah dan Renstra Perangkat daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendorong pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Sekretariat, Bidang-bidang, UPT dan seluruh staf lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau harus solid dan mempunyai tanggungjawab untuk proses Renja perubahan Tahun 2024 sesuai dengan tupoksi;
- b. Kemudian menjaga konsistensi perencanaan, RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- c. Dalam efektifitas pelaksanaannya akan diadakan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala/periodik terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Dokumen Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024 ini, kemudian dapat ditindak lanjuti dengan menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2024.

Pekanbaru, September 2024
KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU



Drs. H.MASRUL KASMY, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690301 199002 1 002



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jalan Pattimura Nomor 2 – Pekanbaru, Kode Pos 28131
Telepon (0761) 44341, Faks (0761) 44342
E-mail : dinaspkh@riau.go.id Website : <https://dispkh.riau.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

Nomor : 188 /Kpts/DPKH-SEKR/11/6224

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU TAHUN 2025 DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU TAHUN 2024

KEPALA DINAS

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 125 sampai dengan Pasal 135 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang dan Lembaran Negara RI Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 46);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53);
13. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1457/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrasi dan Pengangkatan ke Dalam Jabatan Fungsional Melalui Mekanisme Penyetaraan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

14. Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts : 7785/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau atas nama Tengku T Zul Efendi, SH, M.Si dkk;
15. Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 188/Kpts/DPKH-SEKR/2024/0071 Tanggal 11 Januari 2024 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pengelola Administrasi & Keuangan Kegiatan (PPAKK) Dilingkungan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Melakukan Pengumpulan, pengolahan data dan informasi serta melakukan evaluasi rencana kerja tahun sebelumnya;
 - b. Melakukan koordinasi dan penelaahan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan Dokumen Kebijakan Lainnya.
 - c. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Pusat dan instansi terkait lainnya;
 - d. Menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024;
 - e. Melakukan analisis dan pengkajian hasil evaluasi rencana kerja tahun sebelumnya, untuk penentuan isu-isu strategis, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah;
 - f. Perumasan program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai target kinerja dan pendanaan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
 - g. Terlibat secara penuh dalam pembahasan dan penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 1 Februari 2024

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU



Drs. H. MASRUL KASMY, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690301 199002 1 002

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Riau, di Pekanbaru (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Provinsi Riau, di Pekanbaru;
3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN: Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau
Nomor : 188 /Kpts/DPKH-SEKR/II/2024/0224
Tanggal : 01 Februari 2024

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU TAHUN 2025 DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN PROVINSI RIAU TAHUN 2024**

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan Struktural / Fungsional
1	Ketua	Drs. H. Masrul Kasmy, M. Si	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	Sekretaris	Ayu Susanti, SE	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	Sekretariat		
	- Koodinator	Dedy Irawan, SP	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program
	a. Anggota 1	Hamam Ismail, S. Sos, M. Si	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat
	b. Anggota 2	Syed M. Syukri, S. IP	Ketua Tim Kerja Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
	c. Anggota 3	Laila Diana, SP, MM	Fungsional Perencanaan Ahli Muda
	d. Anggota 4	Novriati Teza, S. Pt, M. MA	Penelaah Teknis Kebijakan
	e. Anggota 5	Nurkhadijah, S. Pt	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
4	Kelompok Kerja Bidang Produksi Peternakan		
	- Koodinator	Ir. Elly Suryani, M. Si	Kepala Bidang Produksi Peternakan
	a. Anggota 1	H. Elyan Burza, SP, M.Si	Ketua Tim Kerja Pakan Ternak dan Pengembangan Kawasan Peternakan dan Integrasi Ternak Tanaman
	b. Anggota 2	Ummi Qoriah, S. Pt	Ketua Tim Kerja Budidaya Ternak
	c. Anggota 3	Donny Aprizal, S. Pt	Ketua Tim Kerja Perbibitan Ternak
5	Kelompok Kerja Bidang Agribisnis Peternakan		
	- Koordinator	Drs. Heri Afrizon, M. Si	Kepala Bidang Agribisnis Peternakan
	a. Anggota 1	Elfita Sari Nur, S. Pt	Ketua Tim Kerja Pengolahan, Pamasaran dan Pengembangan Usaha Peternakan
	b. Anggota 2	Eldja Aulia Riza, S. Pi	Ketua Tim Kerja Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan
	c. Anggota 3	Oryza Febrina, S. Pt, M. IP	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kawasan Peternakan
6	Kelompok Kerja Bidang Kesehatan Hewan		
	- Koordinator	drh. Faralinda Sari	Kepala Bidang Kesehatan Hewan
	a. Anggota 1	drh. Revalita Budhiani	Ketua Tim Kerja Kelembagaan, Sumber Daya Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan
	b. Anggota 2	drh. Adriyan Permana Putra	Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
	c. Anggota 3	Salita Syahrial, S. Pt	Ketua Tim Kerja Pengamatan Penyakit Hewan

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan Struktural / Fungsional
7	Kelompok Kerja Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner		
	- Koordinator	Budhi Iskandar, SE, MBA	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner
	a. Anggota 1	Pipi Desvita, S. Pi	Ketua Tim Kerja Higiene Sanitasi
	b. Anggota 2	drh. Ade Rukmantara	Ketua Tim Kerja Pengawasan Keamanan Produk Hewan
	c. Anggota 3	drh. Indahlia Syahfitri Bangun	Ketua Tim Kerja Zoonosis Dan Kesejahteraan Hewan
8	Kelompok Kerja UPT. Inseminasi Buatan Ternak		
	- Koodinator	Mariato Syam, ST	Kepala UPT Inseminasi Buatan Ternak
	a. Anggota 1	Erwan Setiawan, SE, MM	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. IBT
	b. Anggota 2	Mardianto, S. Pt	Kepala Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul, Pembibitan Ternak dan Pemeliharaan Hijauan Pakan Ternak
	c. Anggota 3	Yeane Sabrina, S. STP	Kepala Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku
9	Kelompok Kerja UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan		
	- Koodinator	drh. Rahmat Setiyawan	Kepala UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan
	a. Anggota 1	Marveni Destiana, S. Sos	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. LVKH
	b. Anggota 2	drh. Dewi Anggreini, MM	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
	c. Anggota 3	drh. Amir Subagya	Kepala Seksi Klinik Hewan
10	Kelompok Kerja UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan		
	- Koordinator	Achmad Danafia, SP	Kepala UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan
	a. Anggota 1	Zulkarnain Hasan, S.Si	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT. PTP
	b. Anggota 2	Ekal Hendrayani, S.Pt	Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak
	c. Anggota 3	Wan Saiful Effendi, Ap. M. Si	Kepala Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 1 Februari 2024

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU



Drs. H. MASRUL KASMY, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690301 199002 1 002

VERIFIKASI
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJIA PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2024
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	SESUAI	TIDAK SESUAI	CATATAN VERIFIKASI
i	COVER	JUDUL COVER : "PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJIA PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2024 DINAS/BADAN..... (sesuai Perangkat daerah masing-masing)	✓		Judul cover agar disesuaikan PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJIA PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2024 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
ii	SURAT KEPTUSAN PENETAPAN	- Keputusan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024 (sedang dalam proses penandatanganan) - Tanda Tangan dan Cap Basah	✓		Agar dilampirkan pada Perubahan Rencana Kerja PD 2024 (PERGUB NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN RENJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU)
iii	DAFTAR ISI	Sesuai dengan Isi Perubahan Renja Perangkat Daerah		✓	- Halaman pada daftar isi agar disesuaikan
iv	DAFTAR TABEL	Judul Tabel dan Halaman Tabel		✓	- Judul Tabel dan Halaman Tabel agar disesuaikan
1.	BAB I PENDAHULUAN	Pendahuluan, memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan Renja perangkat daerah;	✓		
2.	BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II TAHUN 2024	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (sampai dengan Triwulan II tahun 2024);		✓	- Pada sub bab 2.3.2 dan 2.3.3 merupakan kalimat yang berulang - Pada hal 41 sub bab 2.5 dan Tabel TC 32 tidak perlu dilampirkan

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	SESUAI	TIDAK SESUAI	CATATAN VERIFIKASI
3.	BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	Rencana Program dan kegiatan/sub kegiatan dalam perubahan Renja PD, memuat kegiatan/sub kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan/sub kegiatan, penghapusan kegiatan/sub kegiatan, penambahan kegiatan/ sub kegiatan baru/kegiatan/sub kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan/sub kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua program dan kegiatan/sub kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan.	✓		
4.	BAB IV PENUTUP	- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; - Kaidah-kaidah pelaksanaan; - Rencana tindak lanjut; - Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan		✓	

Pekanbaru, September 2024

DIVERIFIKASI OLEH :

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

SEKRETARIS

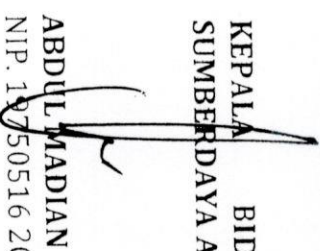

AYU SUSANTI
NIP. 19680427 199803 2 001

SUB KOORDINATOR
PERENCANAAN PROGRAM


DEDI IRAWAN
NIP. 19790722 201001 1 009

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI RIAU

KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN
SUMBERDAYA ALAM


ABDUL MADIAN
NIP. 19750516 200212 1 006

FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA


RIZKY RACHMAWATI
NIP. 19800331 200903 2 002

PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN


HENNY DASRIYANTI
NIP. 19820424 201102 2 001

VERIFIKASI
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2024
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	SESUAI	TIDAK SESUAI	CATATAN VERIFIKASI
i	COVER	JUDUL COVER : "PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2024 DINAS/BADAN..... (sesuai Perangkat daerah masing-masing)	✓		
ii	SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN	- Keputusan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024 (sedang dalam proses penandatanganan) - Tanda Tangan dan Cap Basah	✓		
iii	DAFTAR ISI	Sesuai dengan Isi Perubahan Renja Perangkat Daerah	✓		
iv	DAFTAR TABEL	Judul Tabel dan Halaman Tabel			
1.	BAB I PENDAHULUAN	Pendahuluan, memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan Renja perangkat daerah;	✓		
2.	BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II TAHUN 2024	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (sampai dengan Triwulan II tahun 2024);			

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	SESUAI	TIDAK SESUAI	CATATAN VERIFIKASI
3.	BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	Rencana Program dan kegiatan/sub kegiatan dalam perubahan Renja PD, memuat kegiatan/sub kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan/sub kegiatan, penghapusan kegiatan/sub kegiatan, penambahan kegiatan/sub kegiatan baru/kegiatan/sub kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan/sub kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua program dan kegiatan/sub kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan.	✓		
4.	BAB IV PENUTUP	- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; - Kaidah-kaidah pelaksanaan; - Rencana tindak lanjut; - Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan	✓		

Pekanbaru, September 2024

DIVERIFIKASI OLEH :

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

SEKRETARIS

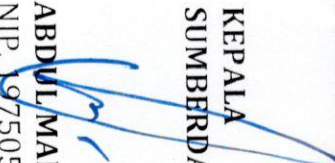

AYU SUSANTI
NIP. 19680427 199803 2 001

SUB KOORDINATOR
PERENCANAAN PROGRAM


DEDI IRAWAN
NIP. 19790722 201001 1 009

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI RIAU

KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN
SUMBERDAYA ALAM


ABDUL MADIAN
NIP. 19750516 200212 1 006

FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA


RIZKY RACHMAWATI
NIP. 19800331 200903 2 002

PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN


HENNY DASHRIYANTI
NIP. 19820424 201102 2 001